



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

TAMAN NASIONAL
BALURAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN

PERATURAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN

Nomor : 32/ T.37/TU/KSA.6/11/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN
TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 5 ayat (2), Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Rencana Strategis Unit Eselon II atau Rencana Strategis UPT dengan berpedoman pada Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 8 ayat (8), Rencana Strategis Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah disetujui Pimpinan Unit Eselon I harus ditetapkan oleh Kepala Balai.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
22. SK Menteri LHK No. SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.18/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA BALAI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.
- (3) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Balai Taman Nasional Baluran
- (4) ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2020-2024 memuat penjabaran strategi pelaksanaan Program dan Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai:
 - a. Acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020-2024 pada unit kerja Balai Taman Nasional Baluran;
 - b. Pedoman bagi seluruh unit organisasi dan pegawai di lingkup Balai Taman Nasional Baluran dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2020-2024.
- (3) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran telah memuat dan menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan sampai tingkat tapak.
- (4) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2020-2024 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.
- (5) Penanggung Jawab Kegiatan baik Eselon II dan Satuan Kerja melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2020-2024.
- (6) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para Direktur dan pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.

Pasal 3

- (1) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2020-2024 ini bersifat indikatif.
- (2) Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2020-2024 dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran.
- (3) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Nomor: 94/BTN.Blir-1.2/2015 tentang Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2015-2019 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 6 November 2020



Pudjiladi, S.Sos
NIP. 19641121 198903 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BALAI
TAMAN NASIONAL BALURAN

NOMOR: P.32 /T.37/TU/KSA.6/11/2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN
TAHUN 2020-2024**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya Kegiatan "RENCANA STRATEGIS TAMAN NASIONAL BALURAN 2020-2024". Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran ini merupakan penjabaran detail dari RPTN, dibuat mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kerangka kerja dan acuan formal bagi Balai TN Baluran selama 5 (lima) tahun ke depan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Taman Nasional Baluran. Di dalam Rencana Strategis Balai TN Baluran terdapat program, kegiatan output dan indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai rencana target yang ingin dicapai selama tahun 2020 – 2024.

Diharapkan dokumen ini dapat mengakomodir kepentingan para pihak, dan menjadi acuan bersama para pemangku kepentingan di tingkat Balai Taman Nasional Baluran selaku pengelola kawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo selaku pemegang otoritas kewilayahan dan pembangunan masyarakat, serta pihak-pihak lainnya untuk berkolaborasi dalam peningkatan pembangunan konservasi di Taman Nasional Baluran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa - desa penyangganya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memperkenankan segala harapan.

Situbondo, 6 November 2020

Kepala Balai TN Baluran



Priyaji, S.Sos

NIP. 19641121 198903 1 003

**RENCANA STRATEGIS
BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN
TAHUN 2020-2024**

**KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Disusun di Situbondo
Pada Tanggal : 6 November 2020

Oleh

Kepala Balai
Taman Nasional Baluran



Erdianto S.Sos
19641121 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	36
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024	
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	50
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I	55
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN	
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Unit Kerja Eselon II dan UPT	58
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT	64
3.3. Pengarusutamaan	67
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Unit Kerja Eselon II dan UPT (cascading)	69
4.2. Target Kinerja	70
4.3. Kerangka Pendanaan	77
BAB V. PENUTUP	79

RINGKASAN EKSEKUTIF

Taman Nasional Baluran (TNB) seluas 25.000 Ha secara administratif terletak di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur. Dalam pengelolaannya, TNB memerlukan pedoman untuk pengelolaan kawasan terutama dalam menghadapi tantangan perubahan dan dinamika global yang berdampak lokal pada semua aspek terkait ekologi, sosial, ekonomi dan kebijakan. Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan dokumen pengelolaan taman nasional selama 5 tahun sehingga dapat dipakai sebagai acuan umum bagi taman nasional, masyarakat dan stakeholder terkait dalam menyusun serta melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan kawasan Taman Nasional Baluran.

Visi yang ditetapkan Balai Taman Nasional Baluran adalah **“Mengembalikan kondisi satwa dan habitatnya seperti pada kondisi awal tahun 1960-an, serta mampu memberikan manfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat”**. Era tahun 1960an dipandang sebagai era dimana kondisi kawasan Baluran ideal, dimana Baluran adalah hamparan savana yang indah, yang dipenuhi oleh berbagai satwa elok dan menjadi objek wisata bagi masyarakat baik lokal maupun asing. Kondisi era tahun 1960-an dipandang ideal untuk meningkatkan peran ekosistem Baluran sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan Visi pengelolaan tersebut ditempuh Misi pengelolaan Taman Nasional Baluran berikut:

1. Melakukan pengelolaan satwa dan habitatnya secara efektif, efisien, dan lestari guna mengembalikan kondisi satwa dan habitatnya seperti pada kondisi awal tahun 1960-an.
2. Melakukan pengelolaan wisata alam melalui pengembangan ekowisata dan wisata minat khusus untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan negara.

Dalam satu dekade lampau, TNB mengalami berbagai permasalahan dan isu penting terkait konservasi TNB, antara lain adalah (1) dinamika ekosistem Baluran yang harus mendapat penanganan serius agar tidak mengarah kepada kehacuran,

(2) penurunan populasi Banteng sebagai icon Baluran dan spesies-spesies lain dengan nilai konservasi tinggi yang disebabkan oleh invasi spesies eksotik, bencana dan masyarakat sekitar TNB, (3) interaksi TNB dengan masyarakat yang harus segera dipecahkan permasalahannya (i.e. permasalahan tanah eks HGU Gunung Kunitir, Tanah Gentong dan Translok AD, dan (4) sektor kepariwisataan yang belum dikelola secara optimal untuk kepentingan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tanaman nasional.

Sesuai dengan struktur organisasi Direktorat Jenderal KSDAE, bahwa Balai Besar Taman Nasional dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Balai Taman Nasional dan Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KSDAE. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang KSDAE setiap UPT lingkup KSDAE sesuai tugas pokok dan fungsinya berkewajiban untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan pada masing-masing eselon 2 di pusat. Implementasi Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan yang terdiri dari 6 kegiatan di Pusat, keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatannya wajib didukung dan dilaksanakan oleh UPT Ditjen KSDAE dengan nama kegiatan yaitu : a) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional dan b) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Taman Nasional Baluran merupakan kawasan pelestarian alam dengan keterwakilan ekosistem yang spesifik kering di Pulau Jawa, yang terletak di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan kawasan konservasi, yang membedakannya dengan kegiatan pengelolaan kawasan lainnya terutama pada adanya pembatasan-pembatasan aktivitas melalui pendekatan alokasi ruang. Pembatasan ditujukan untuk mempertahankan daya dukung alam (*carrying capacity*), kelangsungan potensi sumberdaya alam (*natural capital stock*) dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Lebih spesifik lagi dalam pengelolaan taman nasional ini pembatasan-pembatasan atau pembagian ruang-ruang kawasan tersebut dilakukan melalui pendekatan zonasi. Zonasi taman nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembagian wilayah pengelolaan kawasan taman nasional ke dalam unit pengelolaan, sesuai dengan peruntukannya serta kondisi dan potensi kawasannya agar dapat diciptakan perlakuan pengelolaan yg tepat, efektif, dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut-II/2006 zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Adapun zona taman nasional adalah wilayah di dalam kawasan taman nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Awalnya kawasan ini ditetapkan sebagai Hutan Lindung (*Boschreserve*) pada tanggal 23 Januari 1930 melalui Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (*Gouvernement Besluit van 23 Januari 1930, No. 83*). Kemudian pada tahun 1937, melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 September 1937, No. 9, Lembaran Negara Hindia Belanda 1937, No. 544 (*Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië van 25 September 1937, No. 9, Staatsblad van*

Nederlandsch- Indië 1937, No. 544), areal Baluran ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa (*wildreservaat*) seluas 25.000 ha. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Kawasan Baluran dideklarasikan sebagai Taman Nasional berdasarkan pengumuman Menteri pertanian pada tanggal 6 Maret 1980 bertepatan dengan pelaksanaan kongres Taman Nasional sedunia di Bali. Adapun surat penunjukkan kawasan sebagai taman nasional melalui SK. Menteri Kehutanan Nomor: 279/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997.

Penunjukan Zonasi Taman Nasional Baluran pertama kali dilakukan pada tahun 1987 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) nomor 51/Kpts/DJ-VI/1987. Dua belas tahun setelah itu zonasi diperbarui dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA) nomor 187/Kpts/DJ-V/1999. Menurut surat keputusan tersebut kawasan TNB seluas ± 25.000 ha terdiri dari : Zona Inti ± 12.000 ha, Zona Rimba ± 5.637 ha, Zona Pemanfaatan Intensif ± 800 ha, Zona Pemanfaatan Khusus ± 5.780 ha dan Zona Rehabilitasi ± 783 ha. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan Revisi Zonasi yang memperbarui zonasi kawasan sebelumnya melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor : SK.228/IV-SET/2012. Menurut surat keputusan tersebut kawasan TNB seluas ± 25.000 ha terdiri dari: Zona Inti 8.039,029 Ha, Zona Rimba 16.537,390 ha, Zona Pemanfaatan Intensif 2.156,68 ha yang mencakup wilayah daratan (1.344,45 Ha) dan wilayah perairan (812,23 Ha), Zona Tradisional seluas 1.556,9 Ha yang terdiri dari wilayah daratan seluas 870,01 Ha dan wilayah perairan (laut) seluas 686,89 Ha, Zona Rehabilitasi 424,96 ha, dan Zona Khusus seluas 327,23 Ha.

1.1.1 Lokasi

Kawasan Taman Nasional Baluran secara administratif terletak di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur. Kawasan ini di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan selat Bali, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bajulmati, Desa Wonorejo dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Klokoran, Desa Sumberwaru. Pada peta bumi, letak geografis kawasan berada di $7^{\circ}29'10''$ - $7^{\circ}55'55''$ LS dan $114^{\circ}29'10''$ - $114^{\circ}39'10''$ BT.

1.1.2 Sejarah dan Status Kawasan

Eksistensi kawasan Baluran dalam kesejarahannya diawali pada taun 1920 dengan usulan pencadangan hutan Bitakol seluas ± 1.553 Ha untuk ditetapkan sebagai areal hutan produksi tanaman jati (*jatibosch*) (Wind dan Amir, 1977).

Upaya konservasi kawasan Baluran telah dilakukan sejak pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Rintisan penunjukan menjadi suaka margasatwa telah dilakukan oleh Kebun Raya Bogor sejak tahun 1928. Rintisan tersebut didasarkan pada usulan A.H. Loedeboer (pemegang konsesi lahan perkebunan d sebagian kawasan Baluran di daerah Labuhan Merak dan Gunung Mesigit pada saat itu).

Pada tanggal 23 Januari 1930 diterbitkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 83 (*Gouvernement Besluit van 23 Januari 1930, No. 83*) Baluran ditetapkan sebagai Hutan Lindung (*Boschreserve*).

Pada tanggal 8 Juni 1937, diproses areal-areal yang dimasukkan dalam Hutan Lindung Baluran meliputi :

- Tanah Negara (darat)- Timur Laut dari Semburannya seluas + 219,8 Ha
- Tanah konsesi- gunung Masigit seluas + 227 Ha
- Tanah Negara (Rama)- Rama Masigit seluas + 107,5 Ha
- Hutan Produksi Jati Bitakol seluas + 3.164 ha
- Hutan Lindung Jati seluas + 1.523 ha.

Baru kemudian pada tanggal 25 September 1937, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 9, Lembaran Negara Hindia Belanda 1937, No. 544 (*Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië van 25 September 1937, No. 9, Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1937, No. 544*), areal Baluran ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa (*wildreservaat*) seluas ± 25.000 ha.

Tanggal 24 Juni 1940 (*Suppletio Proses Verbaal Grensregeling*) memasukan daerah-daerah ke dalam Suaka Margasatwa meliputi :

- Kawasan C.O Bajulmati I dan II seluas ± 731.22 Ha (*kultuuronderneming*)
- Kawasan Tanah Negara, daerah Parengan seluas 202 Ha.
- Kawasan sebelah Barat C.O Bajulmati III seluas 168,33 ha.

Pada penunjukan kawasan Baluran sebagai *wild resevaat (game reserve)* pada tahun 1937, areal hutan produksi jati Bitakol dimasukkan juga sebagai bagian kawasan dimaksud seluas total ± 25.000 Ha. Namun demikian penebangan dan penanaman jati terus dilakukan dalam skala kecil. Pada tahun 1949 jawatan kehutanan Banyuwangi membuat rencana pengelolaan hutan untuk hutan Bitakol, diperluas hingga daerah lain di sepanjang jalan provinsi meliputi total areal seluas 4.739 Ha. Areal ini tidak pernah dikeluarkan dari kawasan suaka oleh pemerintah, dan meski disahkan oleh jawatan kehutanan di Jawa sebagai areal pemanfaatan jangka pendek mulai tahun 1955 sampai 1964, kegiatan eksploitasi terus meningkat. Area hutan seluas sekitar 1.000 Ha ditebang habis dan ditanami kembali dengan jati mulai tahun 1955 sampai 1965 dan selanjutnya pada areal seluas sekitar 2.000 Ha mulai tahun 1966 sampai 1976. Kampung-kampung masyarakat juga dibuat di areal ini (masih dalam kawasan suaka) pada periode tersebut untuk menyediakan tenaga kerja dalam pengelolaan areal hutan yaitu di Blok Panggang dan Sidorejo (Wind dan Amir, 1977). Kemudian berkaitan lahan konsesi (HGU) di Labuhan Merak pada tanggal 11 Mei 1962 melalui Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SR/II.P.A/1962, disebutkan tanah konsesi Labuhan Merak seluas 293,6 ha dimasukkan kedalam Suaka Margasatwa Baluran.

Pada prakteknya kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan yang masih berstatus Suaka Margasatwa, pada tahun 1975 Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.16/HGU/DA/1975 memberikan izin usaha kepada PT. Gunung Gunitir atas tanah Labuhan Merak dan Gunung Mesigit seluas 363 Ha selama 25 tahun. Kemudian Menteri Pertanian dengan surat nomor: 544/Mentan/VII/1975 memberi tanggapan terhadap surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, bahwa areal dimaksud telah ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa Baluran sejak tahun 1962. Melalui surat Menteri Dalam Negeri nomor : BtU.10/343/10-77 tanggal 18 Oktober 1977, memberi petunjuk kepada Direktur Utama PT Gunung Gunitir untuk mengembalikan tanah konsesi tersebut kepada Suaka Margasatwa Baluran setelah HGU berlangsung selama 10 tahun, yaitu pada Tahun 1985.

Pada tanggal 6 Maret 1980 bertepatan dengan pelaksanaan kongres Taman Nasional sedunia di Bali, Kawasan Baluran termasuk menjadi salah satu dari 5 (lima)

kawasan yang dideklarasikan sebagai taman nasional oleh Menteri Pertanian seluas ± 25.000 Ha. Yang kemudian penunjukan secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 279/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 seluas ± 25.000 Ha.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 279/Kpts-VI/1997 ini secara resmi merubah status kawasan Baluran yang semula Suaka Margasatwa menjadi Taman Nasional. Dimana pada amar pertama keputusan tersebut, ditetapkan perubahan fungsi Suaka Margasatwa Baluran seluas 23.317 Ha dan perairan sekitarnya seluas 1.287 Ha yang terletak di Kabupaten Dati II Situbondo, Propinsi Dati I Jawa Timur menjadi Taman Nasional Baluran dengan luas 25.000 Ha. Dimana di dalamnya termasuk bagian hutan Bitakol seluas 5.612,3 Ha.

Pada perkembangannya kemudian, pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 417/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Menteri Kehutanan dan Perkebunan menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam, tiga puluh perseratus) Ha. Dan lebih lanjut dalam rangka pengelolaannya, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA) Nomor : 187/Kpts./DJ-V/1999 tanggal 13 Desember 1999, penataan zona pengelolaan pada kawasan seluas ± 25.000 Ha tersebut dibagi terdiri dari Zona Inti seluas ± 12.000 Ha, Zona Rimba seluas ± 5.537 Ha (perairan = 1.063 Ha dan daratan = 4.574 Ha), Zona Pemanfaatan Intensif seluas ± 800 Ha, Zona Pemanfaatan Khusus seluas ± 5.780 Ha, dan Zona Rehabilitasi ± 783 Ha.

Pada tanggal 21 Juli 2011, diterbitkan lagi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.395/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 Ha. Perubahan tersebut mencakup perubahan luas kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Provinsi Jawa Timur menjadi seluas $\pm 1.361.146$ (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh enam) hektar. Dimana kawasan Taman Nasional Baluran termasuk sebagai bagian di dalam Kawasan Suaka

Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 230.126 Ha (4,8 %) untuk wilayah daratan daratan dan 3.506 Ha (0,07 %) wilayah perairan.

1.1.3 Kondisi dan Potensi Kawasan

1.1.3.1 Fisik Kawasan

A. Aksesibilitas

Secara umum aksesibilitas yang dapat menghubungkan kawasan Taman Nasional Baluran dengan daerah lainnya cukup banyak dan relatif mudah. Akses darat relatif mudah karena adanya jalur jalan raya propinsi (Jalur Pantura) yang melewati atau memotong kawasan bagian selatan. Bandara udara terdekat adalah Bandar Udara Blimbingsari di Banyuwangi, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar dan Bandar Udara Juanda di Surabaya. Adapun jalur laut selain melalui Dermaga atau Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, akses langsung menuju kawasan seperti Pantai Bama atau Pantai Perengan juga memungkinkan dilakukan dengan kapal-kapal berukuran kecil atau perahu.

Berikut gambaran aksesibilitas di Taman Nasional Baluran :

No	Rute	Jarak (km)	Jenis	Kondisi	Waktu (menit)
1.	Batangan - Bekol	12	Aspal	Baik	15
2.	Bekol – Bama	3	Aspal	Baik	5
3.	Bekol – Kramat	1	Jalan Berbatu	Rusak	20
4.	Kramat – Talpat	3	Jalan Berbatu	Rusak	40
5.	Bama – Kelor – Kalitopo	3	Jalan Trail	Rusak	40
6.	Sumberanyar – Lab. Merak	12	Jalan Berbatu	Rusak	60

No	Rute	Jarak (km)	Jenis	Kondisi	Waktu (menit)
7.	Batangan – Karangtekok	23	Hotmix	Baik	35
8.	Surabaya – Batangan	255	Hotmix	Baik	300
9.	Situbondo – Batangan	60	Hotmix	Baik	60
10.	Banyuwangi – Batangan	35	Hotmix	Baik	40
11.	Denpasar – Gilimanuk	125	Aspal	Baik	180
12.	Gilimanuk – Ketapang	7	Laut	-	45
13.	Ketapang – Batangan	27	Hotmix	Baik	30

B. Iklim

Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson kawasan TN Baluran beriklim kering tipe F dengan temperatur berkisar antara 27,2°C-30,9° C, kelembaban udara 77 %, kecepatan angin 7 nots dan arah angin sangat dipengaruhi oleh arus angin tenggara yang kuat. Musim hujan pada bulan November-April, sedangkan musim kemarau pada bulan April-Oktober dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember-Januari. Namun secara faktual, perkiraan tersebut sering berubah sesuai dengan kondisi global yang mempengaruhi.

C. Tanah dan Geologi

Secara geologi TN Baluran memiliki dua jenis golongan tanah, yaitu tanah pegunungan yang terdiri dari jenis tanah aluvial dan tanah vulkanik, serta tanah dasar laut yang terbatas hanya pada dataran pasir sepanjang pantai daerah-daerah hutan mangrove. Tanah vulkanik berasal dari pelapukan basalt, debu vulkanik, batuan vulkanik intermedia yang berbentuk suatu urutan bertingkat dari kondisi tanah yang berbatu-batu di lereng gunung yang tinggi dan curam sampai tanah aluvial yang dalam di dataran rendah. Keadaan tanahnya terdiri dari jenis yang kaya akan mineral tetapi miskin akan bahan-bahan organik, dan mempunyai kesuburan kimia yang tinggi tetapi kondisi fisiknya kurang baik karena sebagian besar berpori-pori dan tidak dapat menyimpan air dengan baik.

Tanah yang berwarna hitam yang meliputi luas kira-kira setengah dari luas daratan rendah, ditumbuhi rumput savana. Daerah ini merupakan daerah yang sangat subur, serta membantu keanekaragaman kekayaan makanan bagi jenis satwa pemakan rumput. Tanah-tanah ini lebih mudah longsor dan sangat berlumpur pada musim penghujan. Sebaliknya pada saat musim kemarau keadaan permukaannya menjadi pecah-pecah dengan patahan sampai mencapai kedalaman 80 cm. Keadaan jenis tanah ini sangat menyulitkan untuk konstruksi jalan, karena selalu terjadi pemuaian dan penyusutan sesuai dengan musim.

D. Hidrologi perairan sungai

Taman Nasional Baluran mempunyai tata air radial, terdapat sungai-sungai besar termasuk sungai Kacip yang mengalir dari kawah menuju Pantai Labuhan Merak, Sungai Klokoran dan Sungai Bajulmati yang menjadi batas TN Baluran di bagian Barat dan Selatan. Banyak dasar sungai yang berisi air selama musim penghujan yang pendek, akan tetapi banyak air yang meresap melalui abu vulkanik yang berpori-pori sampai mencapai lapisan lava yang keras di bawah tanah dan keluar lagi pada permukaan tanah sebagai mata air -mata air pada sumber air di daerah pantai (Popongan, Kelor, Bama, Mesigit, Bilik, Gatal, Semiang dan Kepuh), daerah kaki bukit (sumber air Talpat), pada daerah ujung pantai (teluk Air Tawar) dan air laut (dekat Tanjung Sedano). Pada musim hujan, tanah hitam sedikit sekali dapat meloloskan air sehingga air mengalir di permukaan tanah, membentuk banyak kubangan (terutama di sebelah selatan daerah yang menghubungkan Talpat dengan Bama). Pada musim kemarau air tanah di permukaan tanah menjadi sangat terbatas dan persediaan air pada beberapa mata air tersebut menjadi berkurang.

1.1.3.2 Ekosistem

Kawasan Taman Nasional Baluran merupakan kawasan yang memiliki keterwakilan beberapa ekosistem alami di Pulau Jawa yang secara spesifik merupakan representasi daerah beriklim kering di dataran rendah Pulau Jawa. Sehingga beberapa diantaranya juga bersifat khas dan bernilai tinggi baik secara ekologis, aspek estetika hingga potensi pemanfaatannya secara ekonomi. Dan di sisi

lain karena bentang habitat kawasannya yang meliputi wilayah perairan, pantai, dataran rendah hingga gunung berketinggian 1.250 m dpl. di tengah-tengah kawasan juga menjadi faktor terbentuknya tipe-tipe ekosistem yang relatif lengkap atau beragam. Berbagai tipe habitat, vegetasi dan ekosistem tersebut yaitu :

A. Ekosistem Perairan

a) Terumbu karang

Spot-spot lokasi dengan tutupan ekosistem terumbu karang cukup banyak dan tersebar di sepanjang wilayah perairan pantai Baluran yang panjangnya ± 40 km. Yaitu di daerah perairan Blok Gatel – Kajar - Air Tawar, Bilik - Sijile, sepanjang perairan pantai Air Karang – Sirontoh (Air Karang, Demang, Lempuyang, Sirondo, Kakapa, Simacan, Balanan, Batu Hitam, Kajang, Cemara, Kalitopo, Bama, Kelor, Batu Sampan, Popongan, Sigedung dan Sirontoh). Spot di daerah Bama, Bilik dan Sijile merupakan spot dengan kondisi terbaik dibanding spot-spot lainnya dan telah cukup dikenal dalam pengelolaan wisata alam di baluran.

b) Padang lamun

Spot-spot lokasi dengan tutupan ekosistem padang lamun juga banyak tersebar di sepanjang wilayah perairan pantai Baluran yang panjangnya ± 40 km. Yaitu di daerah perairan Blok Gatel – Kajar - Air Tawar, Bilik - Sijile, Air Karang, Demang, Lempuyang, Sirondo, Kakapa, Simacan, Balanan, Batu Hitam, Kajang, Kalitopo, Bama, Kelor, Batu Sampan, Popongan, Sigedung dan Sirontoh. Tutupan padang lamun di daerah Bama paling luas karena merupakan satu hamparan yang meliputi daerah pantai di Blok Kajang – Kalitopo Bama – Kelor – Batu Sampan – Popongan – Sigedung hingga Sirontoh.

B. Ekosistem Pantai

a) Formasi *Pes-caprae*

Tipe vegetasi di daerah pantai berpasir, baik pantai berpasir putih ataupun hitam, yang umumnya didominasi oleh jenis Tang Katang (*Ipomoea Pes-caprae*) dan Tikusan (*Spinifex littoreus*). Terdapat di beberapa daerah pantai yaitu Pantai di Blok Gatel-Kajar, Bilik-Sijile, Kakapa dan Perengan. Beberapa jenis asing dan jenis invasif juga dijumpai tumbuh di beberapa lokasi yaitu jenis *Salsola kali* dan *Tribulus terrestris* di daerah Pantai Bilik, Kakapa dan Batu Sampan.

b) Hutan mangrove

Tipe hutan alami di daerah pantai yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, baik di bawah garis pantai hingga wilayah sempadan pantai ke arah darat. Kawasan Baluran yang lebih dari separuh batas kawasannya merupakan batas pantai (lebih dari 40 km), hutan mangrove ini umumnya tumbuh membentuk *green belt* (sabuk hijau) di sepanjang pantai. Hutan pantai di daerah Blok Batu Sampan merupakan yang paling tebal (hingga lebih dari 750 m ke arah darat) karena tumbuh di daerah tanjung (Tanjung Batu Sampan). Hutan mangrove yang ada di daerah Perengan secara umum juga membentuk sabuk hijau di sepanjang pantai dan tidak terlalu tebal, tetapi di daerah ini beberapa jenis mangrove sejati (*Sonneratia caseolaris*, *Excoecaria agallocha*) dapat dijumpai tumbuh hingga jauh ke darat (hingga lebih dari 2 km dari pantai) berasosiasi dengan vegetasi rawa atau formasi *Barringtonia* di daerah Blok Rowo Jambe-Putatan.

Rekapitulasi hasil inventarisasi mangrove mulai tahun 2005 hingga tahun 2012 yang meliputi keseluruhan areal tutupan hutan mangrove di Taman Nasional Baluran (hutan mangrove di Resort Bama, Watunumpuk-Labuhan Merak, Perengan dan Balanan) didapat luas hutan mangrove di seluruh kawasan $\pm 411,76$ Ha dengan keragaman sebanyak 26 jenis mangrove sejati yang tersebar di sepanjang pantai Baluran.

No	Jenis	No	Jenis
1.	<i>Acanthus ilicifolius</i>	14.	<i>Heritiera littoralis</i>
2.	<i>Acrostichum aureum</i>	15.	<i>Lumnitzera racemosa</i>
3.	<i>Aegiceras courniculatum</i>	16.	<i>Nypa fruticans</i>
4.	<i>Aegiceras floridum</i>	17.	<i>Osbornia octodonta</i>
5.	<i>Avicennia alba</i>	18.	<i>Pemphis accidula</i>
6.	<i>Avicennia lannata</i>	19.	<i>Rhizophora apiculata</i>
7.	<i>Avicennia marina</i>	20.	<i>Rhizophora mucronata</i>
8.	<i>Bruguiera cylindrica</i>	21.	<i>Rhizophora stylosa</i>
9.	<i>Bruguiera gymnorhiza</i>	22.	<i>Sonneratia alba</i>
10.	<i>Bruguiera sexangula</i>	23.	<i>Sonneratia caseolaris</i>

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 11. <i>Ceriops decandra</i> | 24. <i>Xylocarpus granatum</i> |
| 12. <i>Ceriops tagal</i> | 25. <i>Xylocarpus molluccensis</i> |
| 13. <i>Excoecaria agallocha</i> | 26. <i>Xylocarpus rumphii</i> |
-

Hingga saat ini belum dapat dilakukan monitoring dengan pendekatan yang tepat namun keseluruhan luas areal hutan mangrove yang ada secara indikatif dapat dikatakan cukup dinamik. Selain tutupan hutan mangrove yang rusak di masa lalu oleh adanya aktivitas pemanfaatan lahan di daerah eks HGU Labuhan Merak hingga Air Karang, di beberapa lokasi seperti di pantai Blok Bilik-Sijile dan Kakapa tegakan muda dijumpai juga dijumpai terbentuk ke arah laut. Di beberapa areal hutan mangrove yang menjorok ke daerah daratan juga dijumpai adanya *saltflats* (hamparan garam) yang terbentuk seperti di daerah Blok Alas Malang, Air Tawar-Bilik, Sumber Batu, Sigedung, Sisrontoh dan Uyahan.

c) Hutan pantai – hutan rawa pantai (formasi *Barringtonia*)

Secara umum tutupan ini merujuk pada tipe vegetasi di daerah pantai di luar hutan mangrove hingga daerah yang berbatasan (peralihan) dengan vegetasi darat. Karena secara fisik habitat yang ada merupakan pertemuan dua faktor lingkungan (laut dan darat) dan umumnya memiliki kelembaban tinggi, daerah ini umumnya memiliki keragaman jenis vegetasi tinggi karena terdiri dari tetumbuhan darat dan tetumbuhan pantai yang umum dikenal sebagai *mangrove associate* (mangrove ikutan). Hutan pantai di daerah Blok Gatel, Demang dan Perengen-Rowo Jambe merupakan daerah yang merupakan kantong keragaman di kawasan Baluran sehingga merupakan daerah penting secara ekologis.

C. Ekosistem Dataran Rendah

a) Savana

Merupakan tipe vegetasi dengan tutupan dominan rerumputan baik secara homogen atau asosiasi vegetasi (perdu, pepohonan atau hutan musim), secara umum sangat dipengaruhi oleh iklim dan sebagian besar merupakan bentuk klimaks api (karena adanya kebakaran secara reguler). Dimungkinkan merupakan

proporsi tutupan terluas dari keseluruhan tutupan vegetasi pada kawasan Baluran. Wind dan Amir (1977) memperkirakan luasnya sekitar 10.000 Ha.

Secara umum merupakan tipe vegetasi (tipe ekosistem) yang khas dan spesifik, terutama di Pulau Jawa. Sehingga memiliki nilai penting yang tinggi dalam pengelolaan kawasan Baluran baik secara ekologis ataupun secara ekonomis berkaitan potensi pemanfaatannya dalam pengelolaan pariwisata alam.

Dari komposisi vegetasinya dapat dibedakan menjadi beberapa sub-tipe :

- Sub-tipe *grass savanna*

Daerah dengan tutupan homogen rerumputan. Terdapat di daerah puncak gunung dan Blok Palongan.

- Sub-tipe *shrub savanna*

Daerah dengan tutupan dominan rerumputan berasosiasi dengan jenis-jenis vegetasi perdu. Terdapat di daerah Blok Maronggean.

- Sub-tipe *trees savanna*

Daerah dengan tutupan dominan rerumputan berasosiasi dengan tutupan jarang pepohonan. Umumnya membentuk hamparan yang luas di dataran rendah hingga lereng gunung dan merupakan proporsi terluas dari keseluruhan savana yang ada di Taman Nasional Baluran.

- Sub-tipe *woodland savanna*

Daerah dengan tutupan dominan rerumputan berasosiasi dengan hutan terbuka (*woodland*). Terutama tersebar di daerah peralihan dengan hutan musim atau membentuk spot-spot kecil-luas tersebar di daerah-daerah bertutupan hutan musim yang terbuka (berkepadatan pohon rendah).

Namun saat ini karena adanya invasi jenis asing *Acacia nilotica*, sebagian besar areal tutupan savana telah terinvasi dan sebagiannya lagi telah mengalami kerusakan akibat invasi dimana tingkat terparah dari dampak invasi ini adalah berubahnya tipe vegetasi yang semula savana (tutupan dominan-homogen rerumputan) menjadi tegakan homogen *Acacia nilotica*. Hasil pemetaan dan pengukuran sebaran invasi *Acacia nilotica* pada kawasan Baluran tahun 2013 diperkirakan luas total areal terinvasi seluas $\pm 5.592,68$ Ha meliputi tipe habitat/vegetasi savana, hutan musim dataran rendah, semak belukar, hutan

tanaman (jati), areal sekitar perkebunan kapuk randu PT. Baluran Indah dan areal pertanian dan pemukiman masyarakat eks HGU di Labuhan Merak-Balanan. Sebagian besar invasi *Acacia nilotica* terdapat di savana.

b) Hutan musim

Tipe vegetasi atau hutan yang secara umum sangat dipengaruhi oleh iklim (karena adanya periode musim yang menyebabkan perbedaan kelembaban dan kekeringan sangat signifikan, yaitu musim kemarau dan musim hujan). Dapat dibedakan menjadi dua :

- Hutan musim di dataran rendah.

Secara umum membentuk hamparan yang luas di dataran rendah. Didominasi oleh jenis-jenis vegetasi semusim (herba) dan vegetasi (perdu dan pepohonan) gugur yang merepresentasikan respon adaptasi pada kondisi kekeringan yang panjang dengan musim hujan yang pendek dalam setahun. Vegetasi yang ada di dominasi oleh jenis walikukun (*Schoutheimia ovata*), talok (*Grewia* spp.), asem (*Tamarindus indica*), mimbo (*Azadirachta indica*), pilang (*Acacia leucophloea*), klampis (*Acacia tomentosa*), laban (*Vitex pubescens*), kepuh (*Sterculia foetida*) dan lain-lain.

- Hutan musim di dataran tinggi hingga pegunungan

Hutan musim yang ada di daerah dataran tinggi hingga pegunungan. Memiliki penampakan dan komposisi vegetasi yang signifikan berbeda dengan yang ada di dataran rendah karena adanya kondisi edafik dan iklim (yang berbeda). Vegetasi yang ada secara umum sebagian terdiri dari vegetasi gugur yang umum tumbuh di daerah kering dataran rendah dan vegetasi evergreen (hijau sepanjang tahun) seperti serut (*Streblus asper*), *Ficus* spp., *Pterospermum* spp., kawang (*Palaquium amboinense*), trenggulun (*Protium javanicum*), kemiri (*Aleurites molluccana*) dan lain-lain. Dapat dijumpai tumbuh di daerah punggung gunung Baluran bagian selatan hingga barat laut dan dasar kawah.

c) Curah

Merupakan sungai tadah hujan yang terdistribusi secara radial hampir merata ke seluruh bagian kawasan karena tempat tertinggi sebagai daerah tangkapan hujan (gunung) ada di tengah-tengah kawasan. Hanya mengalirkan air pada

saat hujan dan beberapa saat sesudahnya karena segera meresap ke dalam tanah. Meski demikian tetap saja daerah ini memiliki kelembaban yang lebih tinggi dibanding dataran rendah umumnya, sehingga memungkinkan bagi tumbuhnya lebih banyak keragaman vegetasi. Sehingga secara umum tutupan vegetasi di areal ini merupakan alur-alur hijau hampir sepanjang tahun. Berfungsi strategis secara ekologis baik sebagai bagian dari habitat satwa atau sebagai sekat-sekat alami pada saat terjadinya kebakaran pada savana.

d) Sungai

Hanya terdapat di beberapa daerah saja yaitu di daerah gunung (dasar kawah) dan di pinggir kawasan (Sungai Bajulmati, Sungai Klokoran). Karena ketersediaan air dan kondisi kelembaban yang tinggi sepanjang tahun menyebabkan daerah ini menjadi habitat yang kondusif bagi banyak jenis tumbuhan, selain perannya secara ekologis sebagai penyedia air permanen bagi kelangsungan hidup satwa liar.

e) Telaga

Di daerah kering dataran rendah ekosistem telaga ini pada kawasan tidak cukup banyak, sehingga hampir merupakan kondisi fenomenal yang khas di tengah-tengah kondisi kawasan yang umumnya kering. Diantaranya yaitu telaga yang ada di Blok Telogo dan Dung Biru. Di daerah Telogo jenis *Nymphaea nouchali* dijumpai tumbuh di perairannya. Dan di daerah Dung Biru tumbuhan air *Hydrilla verticillata* dijumpai tumbuh di perairannya. Secara umum tempat-tempat ini berfungsi ekologis sangat strategis terutama bagi kelangsungan hidup satwa liar karena ketersediaan airnya sepanjang tahun sebagai bagian dari komponen habitat.

f) Rawa dan kubangan-kubangan alami.

Bentukan rawa dan kubangan-kubangan alami ini di pada kawasan Baluran umumnya terdapat di daerah sepanjang pantai hingga peralihannya dengan dataran rendah. Tipe vegetasi yang terbentuk umumnya juga spesifik karena ketersediaan air yang cukup lama di sepanjang tahun atau bahkan beberapa berair sepanjang tahun. Seperti di daerah Puyangan dan Semiang genangan

air yang cukup lama membentuk tutupan savana dengan komposisi vegetasi (terutama rerumputan) berbeda dengan savana umumnya di Baluran.

Adapun kubangan-kubangan alami secara fisik merupakan kantong-kantong kecil terkumpulnya air tawar (dari adanya sumber air) hingga air payau (sumber air dari tanah yang terpengaruh oleh intrusi atau pasang surut air laut).

Kondisi-kondisi tersebut selain merupakan habitat kondusif bagi tumbuhnya beragam tetumbuhan evergreen juga merupakan penyedia air minum dan berkubang satwa liar sehingga bernilai sangat strategis. Dapat dikatakan keseluruhan jenis satwa liar yang ada di kawasan Baluran memanfaatkan sumber-sumber air ini.

D. Ekosistem Gunung

Selain hutan musim evergreen yang tumbuh di punggung gunung bagian selatan-barat laut dan dasar kawah, bagian gunung lainnya pada punggung gunung sebelah utara hingga tenggara secara umum beriklim kering sehingga bertipe vegetasi gugur tetapi berbeda dengan tipe vegetasi kering/gugur di daerah kering dataran rendah. Demikian juga pada bagian dinding kawah yang sangat curam dan berbatu juga didominasi oleh vegetasi kering yang memiliki komposisi spesifik. Daerah-daerah ini dapat dinilai kurang dalam pemantauannya berkaitan dengan komposisi biotanya (baik flora ataupun faunanya), dimana hal ini terutama disebabkan oleh sulitnya aksesibilitas dan kondisi medan yang berat.

Daerah ini juga merupakan daerah yang secara umum terbebas dari aktivitas manusia. Namun demikian karena tipe vegetasinya yang kering, kebakaran tahunan yang lazim terjadi di daerah kering dataran rendah kawasan (terutama yang berasal dari savana dan hutan musim) berpotensi besar menyebar hingga daerah-daerah ini.

1.1.3.3 Flora

Pada tahun 1977, Wind dan Amir (1977) mengemukakan keragaman jenis yang ada di kawasan Baluran yang dikatakan sebagai list jenis flora permulaan (*preliminary list of flora of Baluran*) sebanyak 444 jenis, dimana 25 jenis diantaranya merupakan jenis asing.

Upaya inventarisasi tumbuhan terus dilakukan, dan hingga saat ini telah tercatat keragaman tumbuhan yang ada di kawasan Taman Nasional Baluran 511 jenis. Tetumbuhan tersebut tumbuh tersebar mulai daerah perairan pantai (padang lamun), pantai, dataran rendah hingga gunung. Dari jenis-jenis tumbuhan tersebut, 26 jenis diantaranya merupakan jenis mangrove sejati, 267 jenis diantaranya merupakan jenis tanaman obat (berkhasiat obat) dan 63 jenis diantaranya tercatat dan teridentifikasi sebagai jenis tumbuhan asing.

Sebaran jenis dominan pada setiap tipe vegetasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis-jenis Flora Dominan di Taman Nasional Baluran

No.	Jenis Flora	Tipe Vegetasi						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Avicenia spp.</i>	*						
2.	<i>Sonneratia spp.</i>	*						
3.	<i>Rhizophora spp.</i>	*						
4.	<i>Ceriops tagal spp.</i>	*						
5.	<i>Dichantium nitidus</i>			*				
6.	<i>Lumnitzera racemosa</i>	*						
7.	<i>Excoecaria agallocha</i>		*					
8.	<i>Sysigium polyanthum</i>		*					
9.	<i>Buchanania arborescens</i>		*					
10.	<i>Acacia leucophloea</i>			*	*			
11.	<i>Schleichera oleosa</i>			*	*	*		*
12.	<i>Schleichera punctata</i>				*			
13.	<i>Sorghum nitidus</i>			*	*			
14.	<i>Zizyphus rotundifolia</i>				*	*		
15.	<i>Erythrina spp.</i>							
16.	<i>Emblica officinialis</i>					*		
17.	<i>Tamarindus indica</i>					*		
18.	<i>Schoutenia ovate</i>					*	*	
19.	<i>Azadarachta indica</i>					*		
20.	<i>Acacia tomentosa</i>					*		
21.	<i>Grewia eriocarpa</i>					*		
22.	<i>Aleurites moluccana</i>						*	
23.	<i>Homalium foetidum</i>						*	
24.	<i>Vitex pubescens</i>						*	
25.	<i>Dryopetes ovalis</i>						*	
26.	<i>Cassia fistula</i>						*	
27.	<i>Heteropogon contortus</i>			*				

Sumber: Rencana Karya Dua Puluh Tahun Taman Nasional Baluran Tahun 1984

Keterangan :

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Hutan mangrove | 5. Undulating savanna |
| 2. Hutan payau | 6. Monsoon dataran rendah |
| 3. Flat savana | 7. Monsoon dataran tinggi |

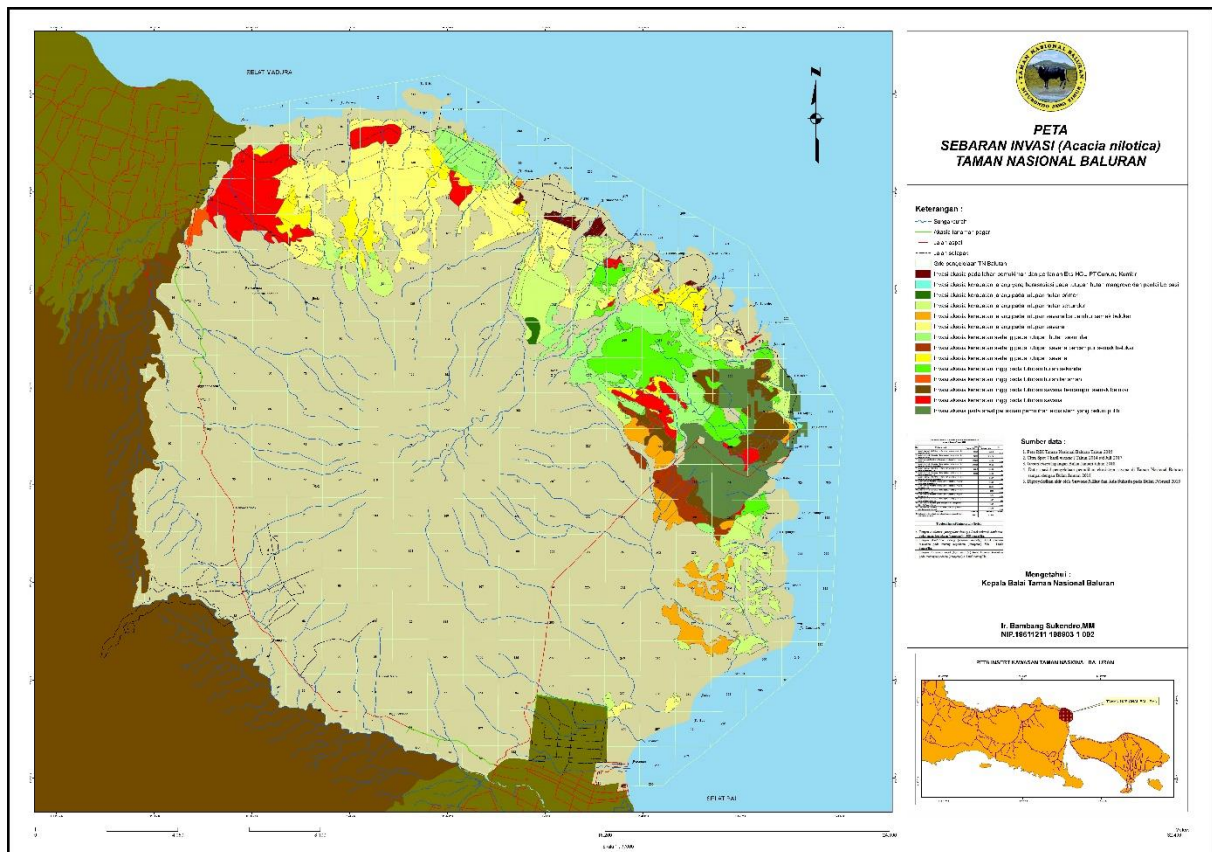
4. Hutan jati

Dari jenis-jenis tumbuhan asing yang ada di kawasan Taman Nasional Baluran tersebut, sebagian diantaranya merupakan jenis invasif (jenis asing invasif). *Acacia nilotica* salah satu diantaranya yang saat ini telah menginvasi kawasan dan menimbulkan dampak paling besar dibanding jenis-jenis asing invasif lainnya.

Hasil kegiatan pemetaan sebaran invasi *Acacia nilotica* pada kawasan Taman Nasional Baluran tahun 2013 (dengan pendekatan interpretasi citra satelit dan ground check), diperkirakan luas sebaran invasi *Acacia nilotica* seluas $\pm 5.592,68$ Ha. Daerah sebaran meliputi tipe vegetasi savanna, hutan musim dataran rendah, semak belukar, hutan tanaman (hutan produksi) di Blok Bitakol, areal sekitar perkebunan kapuk randu PT. Baluran Indah dan areal pertanian dan pemukiman masyarakat eks pekerja HGU PT. Gunung Gunitir. Tingkat kepadatan invasi bervariasi, dikelompokkan pada kepadatan rendah (*low density*) < 500 btg/Ha, kepadatan sedang (*medium density*) $500 - 1.000$ btg/Ha, hingga kepadatan tinggi (*high density*) > 1.000 btg/Ha.

Di beberapa lokasi dijumpai adanya kerapatan yang sangat tinggi. Di Derbus kerapatan mencapai 3.478 btg/Ha, hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya perlakuan pemberantasan yang kemudian tumbuh dan terinvasi kembali. Di daerah Watunumpuk, Lemahbang dan Alas Malang kerapatan dapat mencapai $4.364-5.900$ btg/Ha, hal ini karena adanya aktivitas pemotongan (diantaranya perencekan) harian sehingga individu yang ada berupa trubusan dengan batang cukup banyak membentuk rumpun serupa perdu.

Dampak terbesar dari invasi *Acacia nilotica* pada kawasan Taman Nasional Baluran ini terutama pada habitat savana, dimana dampak terparah yang ditimbulkan mengakibatkan kerusakan ekosistem atau vegetasi hingga berubahnya secara total tipe vegetasi yang ada. Yaitu tipe vegetasi yang semula savana berubah total menjadi tegakan homogen *Acacia nilotica*. Sehingga penanganan invasi pada tingkatan dampak seperti tersebut diatas, tidak cukup hanya dengan perlakuan pengendalian saja tetapi juga harus diikuti dengan perlakuan pemulihan ekosistem untuk mengembalikan tutupan semula yaitu tipe vegetasi savana.



Peta daerah sebaran invasi *Acacia nilotica* pada kawasan Taman Nasional Baluran tahun 2019

1.1.3.4 Fauna

Secara umum keragaman keseluruhan fauna yang ada di kawasan Baluran belum di dapatkan (terutama insekta, mollusca, reptil dan lain-lain). Dari Wind dan Amir (1977) didapatkan angka keragaman jenis mamalia 26 jenis, diantaranya yaitu Banteng (*Bos javanicus javanicus*), Kerbau Liar (*Bubalus bubalis*), Ajag (*Cuon alpinus javanicus*), Kijang (*Muntiacus muntjak muntjak*), Rusa (*Cervus timorensis russa*), Macan Tutul (*Panthera pardus melas*), Kancil (*Tragulus javanicus pelandoc*), dan Kucing Bakau (*Prionailurus viverrinus*). Keseluruhan jenis tersebut masih memerlukan monitoring untuk kepastian keberadaannya saat ini di kawasan Baluran. Seperti jenis kucing bakau (*Prionailurus viverrinus*) sangat langka baik secara global atau secara spesifik di kawasan Taman Nasional Baluran, hingga saat ini belum ada laporan yang dapat menjadi justifikasi atau bukti keberadaannya.

Upaya review keragaman jenis fauna di kawasan Taman Nasional Baluran terus dilakukan hingga saat ini. Keragaman jenis satwa mamalia diketahui terdapat 28 jenis. Jenis kupu-kupu dan ngengat (Lepidoptera) 158 jenis. Jenis burung 234 jenis. Ikan-ikan karang 358 jenis.

Adapun jenis burung dari hasil inventarisasi didapatkan 196 spesies, dari 58 family, 17 ordo. Beberapa diantaranya merupakan jenis dilindungi seperti Elang Jawa (*Spizaetus bartlesii*), Merak Hijau (*Pavo muticus*), Rangkong Badak (*Buceros rhinoceros*), Bangau Tong-tong (*Leptoptilos javanicus*), Jalak Putih (*Sturnus melanopterus*).

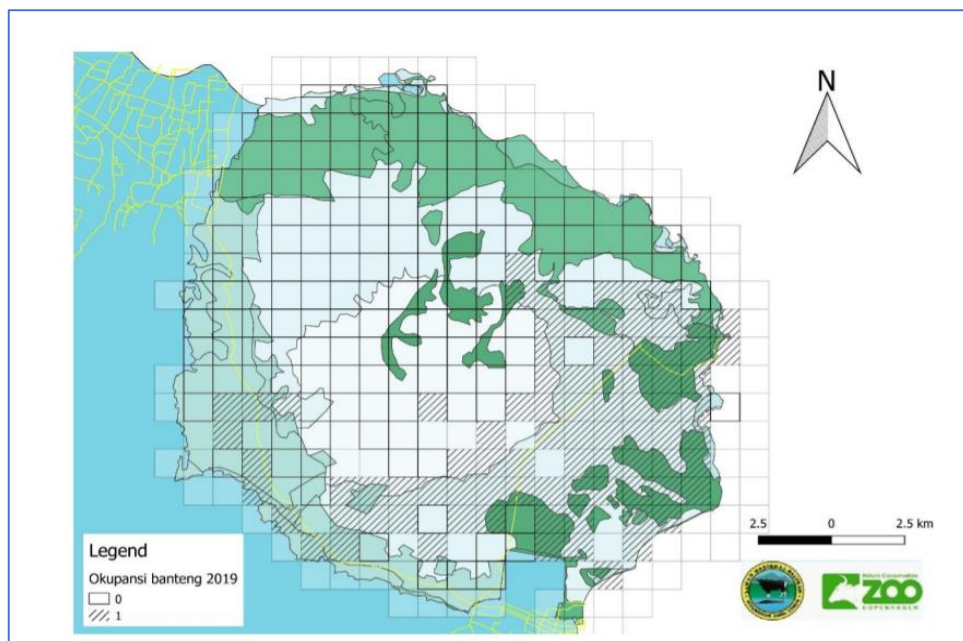
Beberapa jenis satwa yang merupakan bagian dari satwa target peningkatan populasi secara nasional juga terdapat di Baluran yaitu Banteng (*Bos javanicus*), Macan Tutul (*Panthera pardus melas*) dan Elang Jawa (*Spizaetus bartlesii*).

Dari keseluruhan jenis satwa yang ada, dua jenis satwa termasuk jenis prioritas nasional yang ditargetkan peningkatan populasinya sebesar 10 % di tahun 2019. Yaitu jenis Banteng (*Bos javanicus*) dan Macan Tutul (*Panthera pardus*).

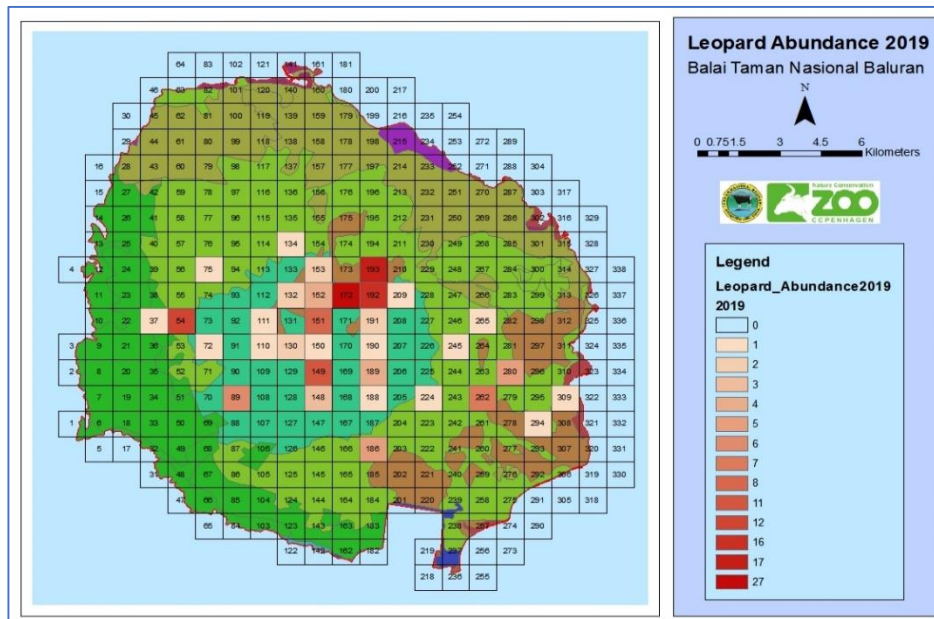
Berikut gambaran kondisi populasi satwa prioritas Banteng (*Bos javanicus*) dan Macan Tutul (*Panthera pardus*) dan beberapa jenis satwa penting lain hasil inventarisasi hingga tahun 2019 :

No	Jenis satwa	Jumlah (ekor)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Banteng (<i>Bos javanicus</i>)	46	45	77	112	132	
2	Kerbau liar (<i>Bubalus bubalis</i>)	***	***	***	113-184	***	
3	Merak hijau (<i>Pavo muticus</i>)	***	1000-1500	***	669-979	***	
4	Macan Tutul Jawa (<i>Panthera pardus melas</i>)	24	24	39	35	35	
5	Rusa	***	***	***	359-492	***	

Daerah sebaran Banteng secara umum terkonsentrasi di bagian tenggara kawasan, meliputi daerah Bekol dan sekitarnya (hingga Talpat, Batu Hitam, Sumber Batu dan Evergreen forest di Curah Uling), daerah Palongan-Semiang dan sekitarnya (meliputi daerah Curah jarak, Popongan, Dung Biru, Plalangan, Rowo jambe dan Grekan) dan daerah Bitakol dan sekitarnya (meliputi daerah Telogo, Panggang, Panjaitan, Tengkong, dan area-area lain di sepanjang Sungai Bajulmati). Meski daerah sebaran dan daerah konsentrasi dari Banteng telah diketahui, hingga saat ini belum dapat dipastikan populasi banteng yang ada di ketiga daerah konsentrasi tersebut (Bekol, Palongan, Bitakol) merupakan kesatuan populasi atau populasi yang terpisah.



Cakupan daerah sebaran Banteng (*Bos javanicus*) di Taman Nasional Baluran. (hasil pendataan sementara hingga tahun 2019)



Cakupan daerah sebaran Macan Tutul
(hasil pendataan sementara hingga tahun 2019).

Adapun berkaitan satwa prioritas Macan Tutul (*Panthera pardus*), perkembangan pendataannya baru didapatkan di tahun 2019, yaitu populasi diperkirakan 35 individu dengan *confident interval* antara 27 – 44 individu; dengan kondisi distribusi yang relatif terkonsentrasi di daerah Perengan atau bagian tenggara kawasan (Inventarisasi Macan Tutul di Taman Nasional Baluran tahun 2019).

1.1.3.5 Infrastruktur

a. Sarana dan Prasarana

Sarana yang terdapat di TN. Baluran semakin lama semakin menandakan adanya perbaikan. Sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung kegiatan wisata yang disediakan oleh TN. Baluran, yaitu *shelter*, *foodcourt* di pantai Perengan, dan pondok dengan biaya sewa tertentu. Sarana prasarana wisata di TN. Baluran kini terfokus di empat lokasi yaitu Batangan, Pantai Perengan, Bekol dan Bama. Fasilitas wisata di Batangan berupa fasilitas Pusat Informasi, di Bekol dan Bama terdapat fasilitas kantor, pelayanan, akomodasi, dan fasilitas untuk

mendukung aktivitas wisata. Jenis-jenis sarana prasarana di TN Baluran dapat di lihat pada Tabel 5.

Tabel Sarana dan Prasarana Wisata Alam di TN. Baluran

Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Lokasi	Tahun Pengadaan	Kondisi
3	4	5	6	7
Gapura/Pintu Masuk	1	Batangan	2004	Baik
Batangan	1	Batangan	2007	Baik
Batangan	1	Perengan	2017	Baik
Perengan				
Musholla				
Batangan	1	Batangan	1986	Baik
Bekol	1	Bekol	1988/1989	Baik
Bama	1	Bama		Baik
Perengan	1	Perengan	2017	Baik
Loket	1	Batangan	1981	baik
Pusat Informasi	1	Batangan	1996/2014	baik
	1	Karangtekok		
Shelter				
Wahana Wisata	1	Batangan, Bekol	1994, 2007	Baik
Bitakol		Bitakol	2013	Baik
Cafetaria				
	1	Batangan	2008	Baik
	1	Bama	2008	
Outbond		-	-	-
Bumi Perkemahan				
Camping Ground	1	Batangan	2009	
HM 8	1	Batangan	2017	baik
Pondok Wisata				
Wisma Rusa	1	Bekol	1965	Baik
Wisma Merak	1	Bekol	1988/1989	Baik
Wisma Banteng	1	Bekol	1989	Baik
Wisma Pilang	1	Bama	1982/1990	Baik
Toilet				
Visitor Center	1	Batangan,		Baik
Bekol	1	Bekol		Baik
Bama	1	Bama		Baik
Perengan	1	Perengan		Baik
Jalan Hutan (Jungle Track)	2	Bekol - Bama		baik
Jembatan Mangrove (Mangrove Trail)	1	Bama	2007	baik

Jembatan antar Tajuk (<i>Canopy Trail</i>)		-	-	-
Menara Pandang	1	Karangtekok	2007	Baik
Karangtekok	1	Batangan	2017	Baik
Batangan	1	Bekol	1981/1982	Baik
Bekol	1	Tower Tengah	1982	Rusak
Tower Tengah	1	Bama	2017	Baik
Bama		Seluruh kawasan / resort	2002 - 2012	Baik
Kendaraan Roda 2				
Kendaraan Roda 4 atau lebih	2 buah	Kantor Balai dan Kantor Seksi	2014 2010	-
Perahu (Speed boat)	1	Bama	1990	Baik
Jetski	2	Bama	2012	Baik
Peralatan selam	10	Bama	2012	Baik
Peralatan pendakian		-	-	-
<i>Foodcourt</i>	1	Perengan	2017	Baik
<i>Plaza Terbuka</i>	1	Perengan	2018	Baik
Pos Jaga	1	Perengan	2018	Baik
Artshop	1	Perengan	2018	Baik

2. Aksesibilitas

Lokasi Taman Nasional Baluran sangat mudah dijangkau karena terletak di tepi jalan raya Situbondo – Banyuwangi Km. 35 yang merupakan jalan nasional jalur utama Surabaya - Banyuwangi. Kantor Balai TN Baluran sebagai pintu masuk menuju kawasan berada pada jalur tersebut. Untuk menuju obyek wisata savana Bekol dan pantai Bama dapat menggunakan mobil atau sepeda motor sedangkan untuk menyusuri kawasan laut dapat menggunakan perahu yang berada di sekitar Pantai Perengan dan Pelabuhan Gatel. Akses menuju ke sepuluh (10) lokasi Zona Pemanfaatan untuk pengembangan wisata terdiri dari tiga (3) kategori yaitu:

- akses kategori mudah meliputi lokasi ZP Batangan/Camping Ground HM 10, ZP Waduk Bajulmati, ZP Pantai Perengan, ZP Karangtekok dan ZP Wahana Bitakol yang terletak di pinggir jalan raya Situbondo-Banyuwangi;
- akses kategori sedang meliputi ZP Bekol, dan ZP Bama dengan kondisi jalan beraspal dan

- c. akses kategori sulit meliputi Candi Bang, Batu Hitam dan Bilik Sijile yang melalui jalan setapak atau akses laut menggunakan perahu.

Adapun aksesibilitas untuk menuju kawasan Taman Nasional Baluran dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7 sebagai berikut :

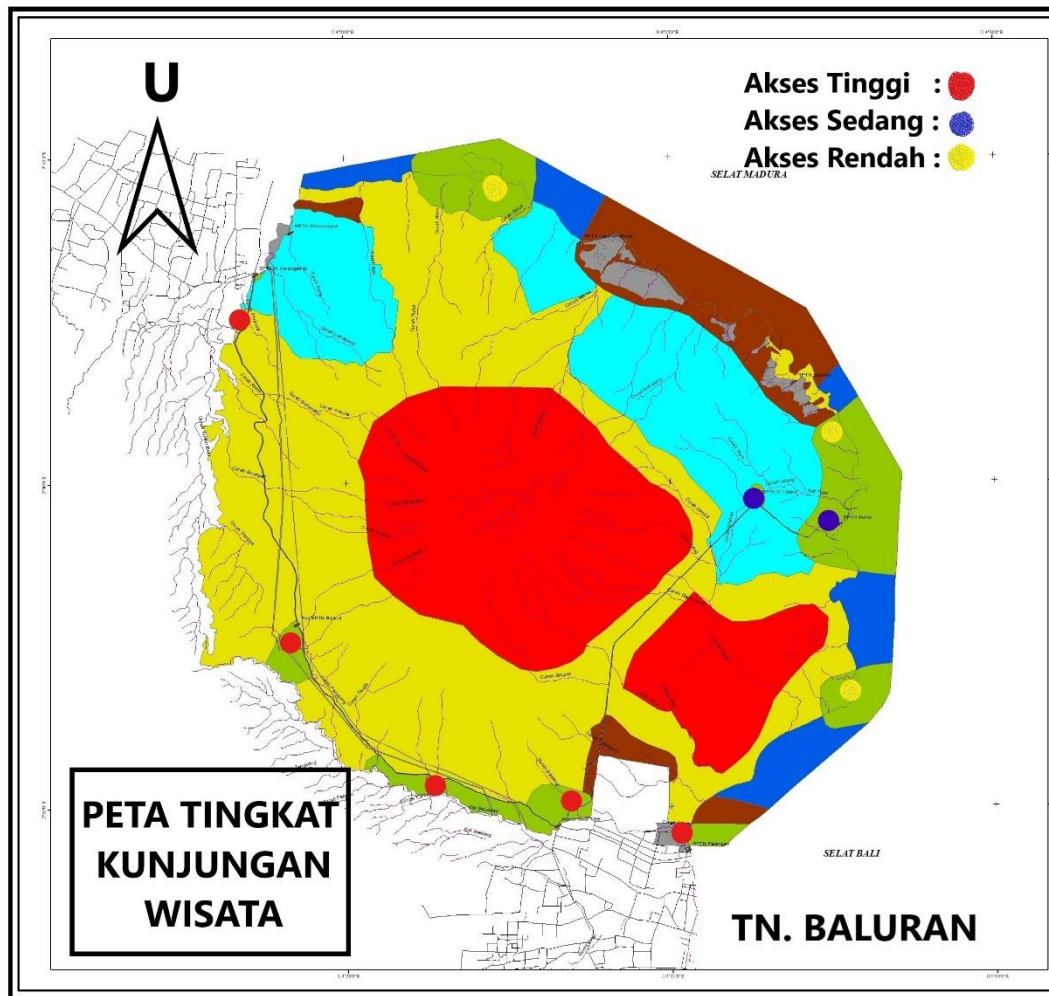
Tabel Aksesibilitas menuju TN. Baluran

Rute	Jarak (km)	Waktu (jam)	Transportasi
Surabaya – TN. Baluran	262	8	Bus
Denpasar - Gilimanuk	167	7	Bus
Gilimanuk - Ketapang	3	1	Kapal Ferry
Ketapang – TN. Baluran	27	1	Bus

Tabel Aksesibilitas dalam kawasan TN. Baluran

No .	Rute	Jarak (km)	Jenis	Kondisi	Waktu (menit)
1	Batangan – Bekol	12	Aspal	Cukup	30
2	Bekol – Bama	3	Aspal	Baik	10
3	Bekol – Kramat	1	Jalan	Rusak	20
4	Kramat – Talpat	3	berbatu	Rusak	40
5	Bama – Kelor – Kalitopo	3	Jalan	Baik	40
6	Sumberanyar – Labuhan	13	berbatu	Rusak	60
7	Merak	23	Makadam	Baik	35
8	Batangan – Karangtekok	255	Jalan	Baik	300
9	Surabaya – Batangan	60	berbatu	Baik	60
10	Situbondo – Batangan	35	Hotmix	Baik	40
11	Banyuwangi – Batangan	125	Hotmix	Baik	180
12	Denpasar – Gilimanuk	7	Jalan	Baik	45
13	Gilimanuk – Ketapang	27	berbatu	Baik	30
14	Ketapang – Batangan	65	Jalan	Baik	145
	Pulau Menjangan – Batu Hitam		berbatu Aspal Laut Hotmix Laut		

Adapun peta aksesibilitas masing-masing obyek wisata dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar Peta tingkat kunjungan wisata

1.1.3.6 Organisasi

Pengelolaan Balai Taman Nasional Baluran Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, dimana Balai Taman Nasional Baluran Masuk kedalam Balai Taman Nasional Type B yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Bekol;
- c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karangtekok;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional (Polhut, PEH dan Penyuluh).

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan taman nasional
- b. Pengelolaan kawasan taman nasional
- c. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan kawasan taman nasional
- d. Pengendalian kebakaran hutan
- e. Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
- f. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
- g. Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraaan
- h. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional
- i. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

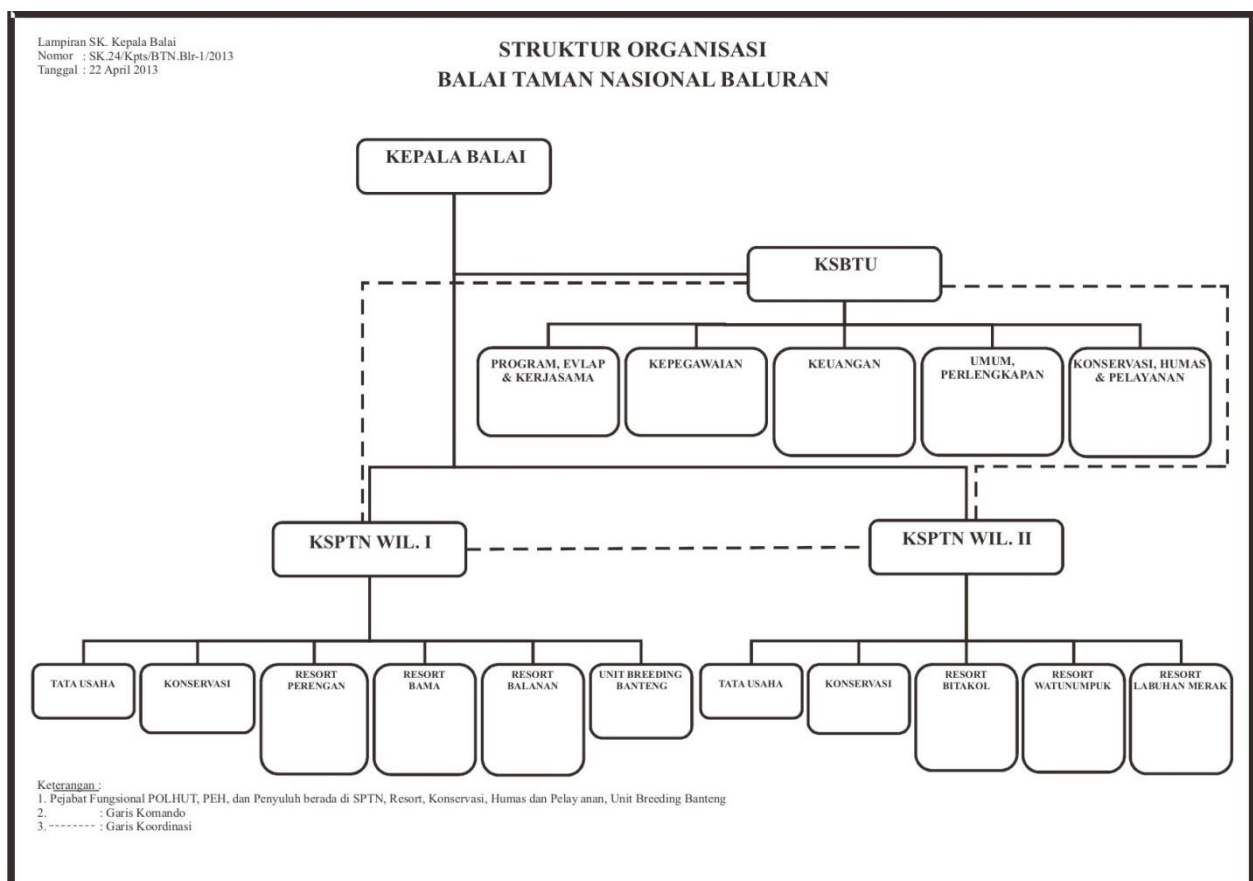
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas baik administrasi maupun pengamanan kawasan di lapangan sekaligus upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.03/Menhut-II/2007, Kepala Balai Taman Nasional mengeluarkan Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Baluran Nomor : SK.24/Kpts.BTN.Blr/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional Baluran. Didalam menjalankan tugasnya yaitu pengelolaan ekosistem kawasan taman nasional dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Balai Taman Nasional dibantu:

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, perencanaan, kerjasama, data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
- b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, bimbingan teknis, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,

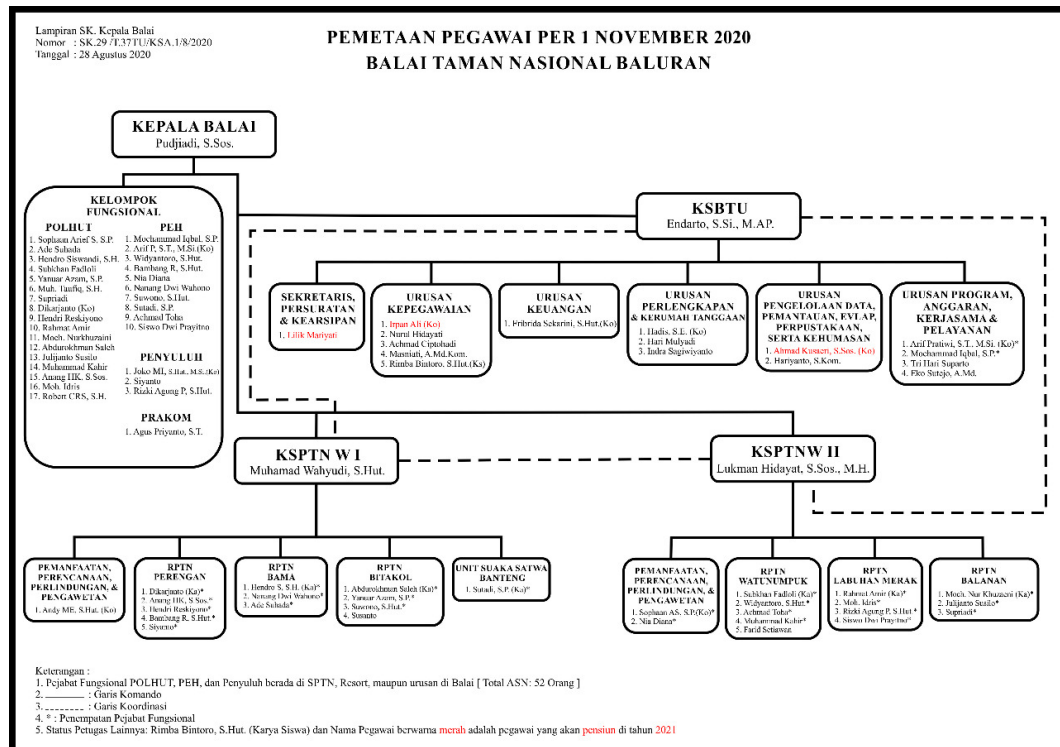
pengelolaan kawasan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestari, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, pemberantasan penebangan dan peredaran kayu, tumbuhan, dan satwa liar secara illegal serta pengelolaan sarana prasarana, promosi, bina wisata alam dan bina cinta alam, penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta kerjasama di bidang pengelolaan kawasan taman nasional

- c. Kepala Resort Pengelolaan Taman Nasional.
- d. Koordinator lingkup Balai Taman Nasional.
- e. Kelompok jabatan fungsional konservasi terdiri dari :
 - Polisi Kehutanan
 - Pengendali Ekosistem Hutan

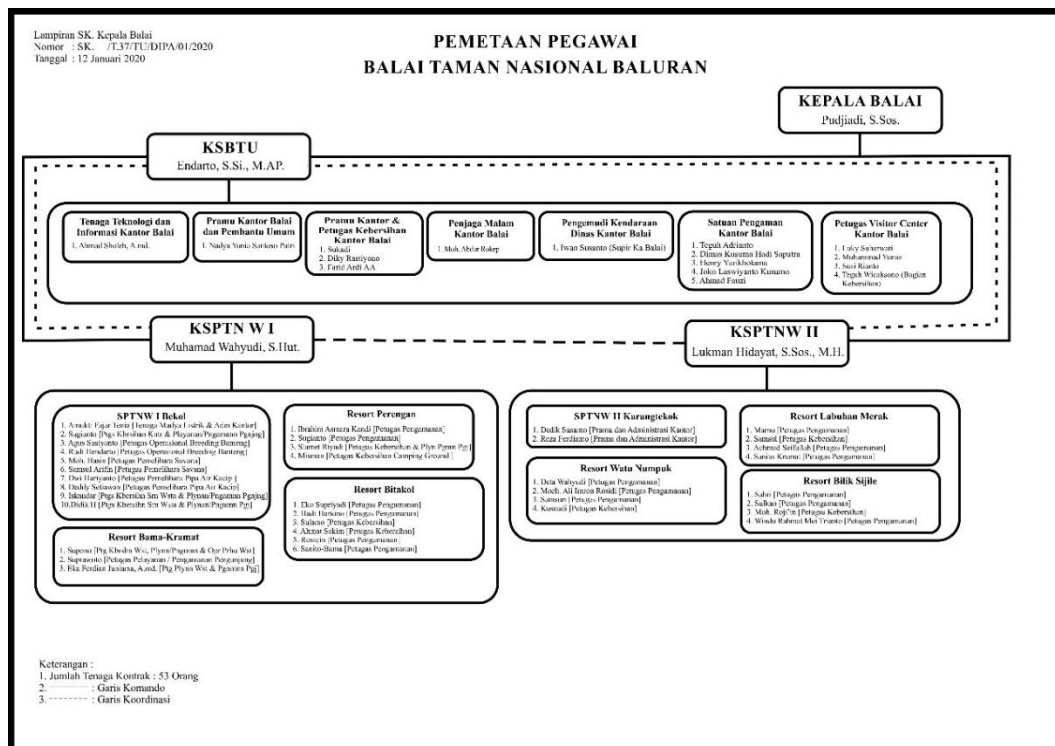
Berdasarkan surat keputusan tersebut, struktur organisasi dan tata kerja Balai Taman Nasional Baluran dapat dilihat pada gambar berikut:



Sedangkan sebaran ASN dan Non ASN ditampilkan pada gambar berikut ini :



Sebaran ASN Balai Taman Nasional Baluran



Sebaran NON ASN Balai Taman Nasional Baluran

1.1.3.7 Permasalahan, Gangguan dan Tekanan pada Kawasan

Secara umum permasalahan yang berpotensi besar menjadi gangguan dan tekanan pada kawasan, ekosistem dan hidupan liar didalamnya disebabkan oleh adanya berbagai aktivitas masyarakat baik yang ada di dalam ataupun dari luar kawasan. Diantaranya yaitu :

- a. Permasalahan Kawasan yang berupa permasalahan tenurial
 - i. Permasalahan eks HGU Gunung Gunitir
 - ii. Permasalahan Kawasan Hutan Bitakol
 - iii. Permasalahan Translok AD
 - iv. Permasalahan Tanah Gentong
- b. Permasalahan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
 - i. Invasi Akasia Berduri (*Accacia nilotica*)

Pengelolaan potensi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Baluran dihadapkan pada berbagai dinamika kondisi baik internal maupun eksternal. Salah satunya yaitu adanya jenis tumbuhan eksotik Akasia (*Acacia nilotica*). Sebarannya saat ini bukan hanya terbatas pada tipe habitat savana saja tetapi juga dijumpai di daerah hutan musim dataran rendah (hutan sekunder), hutan pantai sampai di pinggiran hutan mangrove. Selain sebarannya yang sudah sangat luas, dampak terbesar dari invasi *A. nilotica* ini adalah kerusakan tutupan sampai dengan perubahan total tipe vegetasi di sebagian besar areal savana. Dampak invasi juga mengakibatkan menurunnya daya dukung satwa herbivora (termasuk banteng) dengan sangat signifikan berkaitan kebutuhan pakan dan ruang. Dan savana sebagai aset khas Taman Nasional Baluran (potensi ikonik), dampak invasi mengakibatkan kerugian finansial dan ekonomi yang sangat besar karena hilangnya salah satu daya tarik utama dalam pengusahaan pariwisata alam.

- ii. Penurunan populasi Banteng
- iii. Penurunan kualitas habitat banteng dan ekosistem savanna
- iv. Pemanfaatan Hasil hutan baik kayu dan non kayu oleh masyarakat

- v. Kondisi iklim yang relatif kering dan dominasi ekosistem savanna dengan potensi bahan bakar yang tinggi disaat musim kemarau, berdampak pada terjadinya kebakaran hutan setiap tahun di Taman Nasional Baluran.
- vi. Belum optimalnya kontribusi wisata alam dalam menunjang pengelolaan Taman Nasional.

Aktifitas wisata merupakan masalah yang sangat dilematis. Di satu sisi pengelolaan taman nasional menjadikan pengembangan wisata sebagai bagian dari tujuan pengelolaan kawasan taman nasional, namun pada volume pengunjung yang sangat besar wisata menjadi masalah baru yang tidak bisa diabaikan. Beberapa dampak dari adanya wisata dalam taman nasional yang bisa menyebabkan terganggunya sistem ekologis antara lain: penumpukan sampah, perubahan perilaku satwa, dan pemadatan tanah. Bahkan untuk wisata air, kerusakan terumbu karang sangat mungkin terjadi. Kendala lain adalah penumpukan aktifitas wisata hanya di beberapa lokasi yaitu Bekol dan Bama.

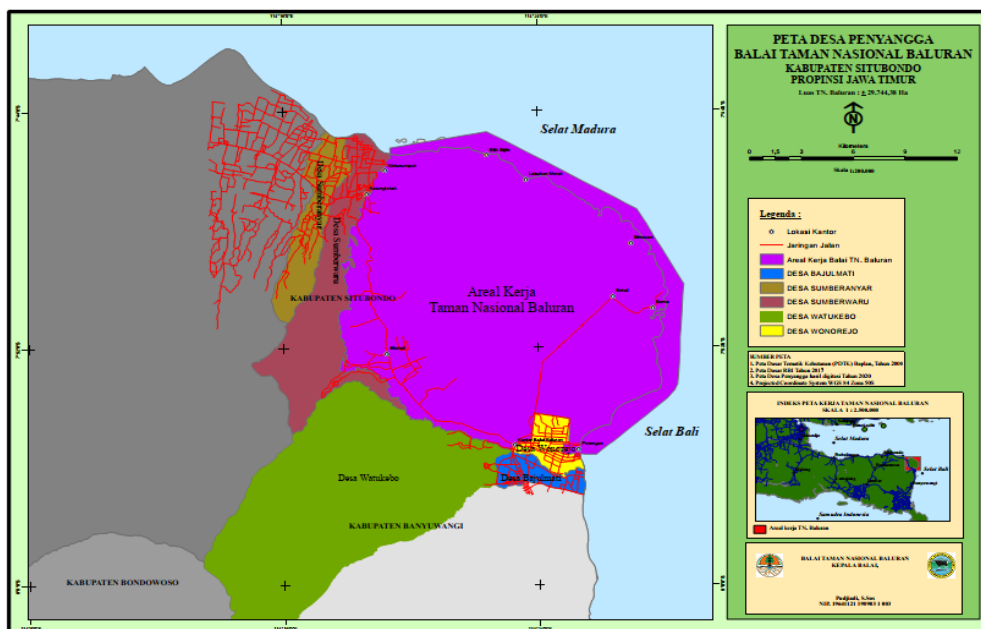
- c. Pemanfaatan kawasan oleh masyarakat
 - 1. Pemukiman dan pertanian
 - 2. Penggembalaan ternak dan pengambilan rumput
 - 3. Pencurian kayu (illegal logging), kayu bakar, bambu dan rotan
 - 4. Pemanfaatan hasil hutan non kayu
 - a. Perburuan
- d. Permasalahan kelembagaan dan organisasi
 - i. Keterbatasan SDM Pengelola baik secara kualitas maupun kuantitas.
 - ii. Struktur umur, pangkat dan golongan pegawai yang timpang
 - iii. Komitmen terhadap pendanaan dan konsistensi terhadap perencanaan Taman Nasional

1.1.4 Daerah Penyangga

1.1.4.1 Letak, Luas dan Aksesibilitas

Secara administrasi pemerintahan, TNB masuk ke dalam lima desa, yaitu Desa Wonorejo, Desa Sumberwaru, dan Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;serta Desa Bajulmati dan Desa Watukebo di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Posisi TNB dalam konfigurasi desa tersebut secara geografis.

Masyarakat desa penyangga hutan merupakan masyarakat yang secara turun temurun tinggal dan menetap di sekitar atau di dalam kawasan hutan dan mempunyai potensi besar untuk berinteraksi dengan kawasan hutan.Masyarakat desa penyangga TNB sebagian besar adalah suku Jawa dan Madura. Kehidupan sosial sangat kental dengan nuansa agamis dan kultur masyarakat pesantren yang lebih mengedepankan karakter tokoh agama di masyarakatnya. Adapun Pengaruh kedua suku ini dapat dilihat pada acara-acara seperti perkawinan dan khitanan namun, tidak ada kebudayaan khusus yang berkembang di masyarakat.



Gambar Peta Penyangga TN Baluran

Daerah Penyangga TN Baluran terdiri atas 5 (lima) desa penyangga yaitu Sumberwaru, Sumberanyar, Wonorejo yang masuk Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo; dan Bajulmati dan Watukebo yang masuk Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Tetapi yang secara geografis berbatasan langsung dengan kawasan hanya 2 (dua) desa yaitu Desa Sumberwaru dan Desa Wonorejo. Kedua desa inilah yang sering berinteraksi nyata dengan hutan Baluran.

Tabel Data kependudukan desa penyangga TNB

No	Desa Penyangga TNB	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Sumberanyar	2.070,66	15338	5594	0,07
2	Sumberwaru	4.591,29	4233	427	0,01
3	Wonorejo	845,91	6591	2171	0,08
4	Watukebo	14.108,19	3115	320	0,00
5	Bajulmati	530,62	5112	3850	0,10
		22.146,67	34.389	12.362	0,02

Sumber: diolah dari data monografi desa tahun 2018

No	Nama Desa	Status Desa	Luas (ha)
1.	Sumberwaru	Berbatasan Langsung	4.591,29
2.	Wonorejo	Berbatasan Langsung	845,91
3.	Sumberanyar	Tidak Berbatasan Langsung	2.070,66
4.	Bajulmati	Tidak Berbatasan Langsung	530,62
5.	Watukebo	Tidak Berbatasan Langsung	14.108,19

Sumber: Monografi desa 2018

Kecamatan Banyuputih merupakan wilayah administrasi dari Kabupaten Situbondo yang terletak sekitar 38 Km kearah timur dari pusat pemerintahan, dan memiliki batas-batas : Sebelah timur Selat Bali, Sebelah Selatan Kabupaten Banyuwangi, Sebelah Utara Selat Madura, dan Sebelah Barat Kecamatan Asembagus. Untuk mencapai daerah penyangga tersebut, dapat digunakan sarana transportasi darat maupun air. Sarana transportasi darat adalah pilihan utama mengingat desa-desa tersebut dilalui oleh jalur pantai utara (Pantura) yang menghubungkan Banyuwangi/Bali-Surabaya, sedangkan jalur air bisa dilalui menggunakan perahu dimana pelabuhan terdekat ada

di Pandean (Wonorejo) dan Ketapang (Sumberwaru) di kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Jangkar.

Pada umumnya di tingkat desa telah terdapat aparat/perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris dan staf serta adapula BPD (Badan Perwakilan Desa) yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Administrasi umum desa telah berjalan teratur namun di sebagian besar desa, pelaksanaan administrasi kependudukan dan administrasi keuangan masih banyak yang tidak teratur.

1.1.5 Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Sekitar

Tabel Mata pencaharian masyarakat desa penyangga TNB

No	Jenis Mata Pencaharian	Prosentase (% dari jumlah penduduk)				
		Sumberanyar	Sumberwaru	Wonorejo	Watukebo	Bajulmati
1	PNS/TNI/Karyawan	2,53	2,53	5,25	4,29	2,01
2	Pedagang/Wiraswasta	2,52	1,23	3,05	16,24	8,37
3	Petani	14,66	16,52	12,13	14,43	14,63
4	Pertukangan	3,01	3,01	0,84	7,22	2,14
5	Buruh tani	47,87	49,24	43,31	55,24	57,31
6	Pensiunan	0,62	0,14	2,25	0,14	1,36
7	Nelayan	24,62	24,11	18,01	-	-
8	Jasa	2,17	1,12	4,38	0,36	5,48
9	Peternak	1,58	0,46	8,35	1,46	7,26
10	Lain-lain	0,42	1,64	2,43	0,62	1,44
Total		100	100	100	100	100

Sumber : Diolah dari data monografi desa tahun 2018

Kepadatan penduduk desa penyangga TNB sangat rendah (0,02 jiwa/km²). Sebagian besar masyarakat desa penyangga TNB bermata pencaharian sebagai buruh tani sawah atau ladang, sekitar 50,59% dari keseluruhan jenis mata pencaharian di masing-masing desa dengan tingkat pendapatan yang sangat rendah yaitu sekitar Rp. 750.000,-/bulan/kapita (BTNB 2013). Gambaran mata pencaharian penduduk desa penyangga TNB seperti terlihat dalam data diatas. Masyarakat yang hidup di sekitar

kawasan hutan seluruh Indonesia masih tergolong sebagai masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan bermata pencaharian sebagai buruh tani ataupun pekerjaan kasar yang lainnya (Marzuki 2008).

Mata pencaharian masyarakat desa penyangga TNB didominasi oleh buruh tani dan petani. Secara rata rata mata pencaharian sebagai petani di lima desa penyangga TNB sekitar 14,47% dan penduduk yang bermata pencaharian sebagai PNS/TNI/Karyawan adalah yang terkecil, yaitu sekitar 3,32%. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa penyangga TNB sebagian besar lebih memilih tinggal dan bekerja sekedarnya saja di kampung atau desanya sendiri daripada harus pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Masyarakat desa penyangga TNB tidak pernah ingin berkembang atau maju dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Faktor utama yang menyebabkan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh tani masih tinggi atau dominan yaitu kondisi pertanian desa yang mendukung. Luasan lahan pertanian baik sawah maupun ladang rata-rata di desa penyangga TNB sekitar 45,26% dari total luasan desa. Sehingga penduduk desa penyangga TNB lebih memilih bekerja ke sawah atau ladang dengan berbagai jenis pekerjaan buruh tani.

Faktor pendidikan masyarakat desa penyangga TNB juga turut mempengaruhi tingkat mata pencaharian. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi jenis mata pencaharian yang didapatkan oleh mereka. Tingkat pendidikan masyarakat desa penyangga TNB masih didominasi lulusan sekolah dasar (SD) rata-rata 56,89% sedangkan yang mempunyai kualifikasi pendidikan tinggi (Akademi/D3/S1) sangat minim sekitar 1,50%.

Hal ini sangat memberikan pengaruh terhadap kesempatan masyarakat untuk mendapatkan mata pencaharian yang lebih baik seperti menjadi PNS/TNI/Polri, karyawan perusahaan yang ternama, dan pekerjaan lain yang mempunyai tingkat pendapatan diatas upah minimum regional (UMR) daerah setempat.

Tabel Tingkat pendidikan masyarakat desa penyangga TNB

No	Tingkat Pendidikan	Prosentase (%)				
		Sumberanyar	Sumberwaru	Wonorejo	Watukeyo	Bajulmati
1	Taman Kanak-kanak	0,99	0,99	1,29	0,24	1,22
2	Sekolah Dasar / MI	55,96	61,78	40,38	59,16	66,73
3	SLTP / MTs	24,21	18,48	31,29	19,1	17,89
4	SLTA / MA	12,92	12,83	22,24	17,26	12,76
5	Akademi/D1 – D3/Sarjana	0,39	0,39	1,1	4,24	1,4
6	Lulusan Pendidikan Khusus	5,53	5,53	3,7	-	-
Total		100	100	100	100	100

Sumber : Diolah dari data monografi desa tahun 2018

Masyarakat sekitar TN. Baluran memiliki nilai-nilai budaya yang masih dipelihara seperti tradisi 'Selamatan' dan 'Petik Laut' yang diadakan sekali dalam setahun sebagai bentuk rasa syukur atas rejeki yang diperoleh itu harus dinikmati bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki program untuk membangun desa-desa penyangga di sekitar TN Baluran khususnya Desa Wonorejo yang ditunjuk menjadi Desa Wisata Kebangsaan. Program ini merupakan salah satu bentuk untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan kerukunan di dalam masyarakat sekaligus mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Sebagian besar, masyarakat desa penyangga di sekitar Taman Nasional Baluran merupakan masyarakat pendatang dari Madura. Sehingga dalam keseharian bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura. Begitupun budaya, adat istiadat maupun kesenian sangat dipengaruhi oleh budaya dan kesenian Madura.

1.1.5.1 Keadaan Biofisik Daerah

Luas Kecamatan Banyuputih adalah 481.670Km² atau 48.167 Ha, yang memiliki pantai dan sebagian besar wilayah Kecamatan Banyuputih merupakan tanah

datar dengan ketinggian 0-10 m dari permukaan laut. Rata – rata curah hujan adalah 172 mm tahun 2010 dengan keadaan tanah datar dan sifat tanah legosol.

Berdasarkan letak geografisnya, desa-desa di Kecamatan Banyuputih ini dikategorikan sebagai desa pantai karena wilayahnya berbatasan dengan garis pantai/laut dengan corak kehidupan sebagian masyarakatnya tergantung pada potensi laut.

Tanah di desa-desa daerah penyangga umumnya mempunyai tingkat kesuburan yang relatif rendah serta mengandung bahan induk masam dan miskin zat hara. Wilayah Kecamatan Banyuputih seluas 481,67 km² terbagi atas lahan sawah seluas 3.103 ha dan lahan kering seluas 5.159 ha. Luas lahan sawah menurut penggunaannya terbagi menjadi 64 ha sawah berpengairan sederhana, 3.039 ha teknis dan tidak ada sawah tanpa pengairan (sawah tadah hujan). Sedangkan luas lahan kering menurut penggunaannya terbagi menjadi tegalan (3.165 ha), pekarangan (1.259 ha), dan penggunaan lainnya (735 ha).

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami permasalahan dan tekanan dari dalam dan luar kawasan itu sendiri. Termasuk taman nasional, juga mempunyai ancaman terhadap pengelolaan kelestaiannya (Kadir W 2013). Berbagai permasalahan yang sering terjadi dan dihadapi dalam upaya pengelolaan kawasan taman nasional diantaranya yaitu: Terjadinya tumpang tindih kepentingan dari berbagai pihak; Belum adanya kesamaan persepsi mengenai fungsi, kedudukan dan peran taman nasional dimata masyarakat dan pihak terkait lainnya (Mangindaan 1999); Terjadinya tekanan aktifitas pelanggaran kehutana oleh masyarakat sekitar hutan dan masih banyak permasalahan lainnya.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia menuntut perhatian yang sangat serius dari pihak pengelola kawasan. Menurut Basuni (2003:49), terdapat tiga level permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi yang menuntut keseriusan dan integrasi interdisipliner yaitu: Permasalahan biologis, Permasalahan anthropologis atau sosial masyarakat dan permasalahan keterbatasan lahan dan sejarah pemanfaatan lahan masa lalu sebelum ditunjuk/ditetapkannya sebagai kawasan konservasi.

Berdasarkan fenomena keilmuan seperti diatas, dan kondisi dilapangan yang mencakup isu-isu stretegis yang ada pada saat ini, maka dapat dijabarkan dalam kerangka potensi dan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kawasan TN Baluran. Adapun beberapa hal ikhwal terkait potensi yang ada di TN Baluran sebagai berikut :

1. TN Baluran mempunyai tipe ekosistem yang sangat kompleks, mulai dari perairan hingga ekosistem pegunungan (pegunungan bawah). Kurang lebih terdapat 6 tipe ekosistem yang ada di TN Baluran.
2. Keanekaragaman hayati di TN Baluran cukup tinggi, salah satu nya dari kekayaan jenis Aves yang menyumbang kurang lebih 17 % dari kekayaan jenis di Indonesia.
3. Potensi wisata alam (ekowisata) di TN Baluran menjadi salah satu primadona destinasi wisata di Jawa Timur, khususnya hamparan savana yang menjadi daya tarik wisata.
4. *Trend* kunjungan wisatawan yang datang ke TN Baluran dari tahun ke tahun terus meningkat sangat signifikan.
5. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di TN Baluran sangat melimpah dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.
6. Cadangan karbon (*carbon stock*) di TN Baluran sangat tinggi dan tersebar hampir diseluruh tipe ekosistem yang ada.

Sedangkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh TN Baluran hingga saat ini antara lain yaitu :

1. Ancaman kerusakan berbagai tipe ekosistem akibat pengaruh manusia dari tindakan pelanggaran kehutanan seperti, *illegal logging*, kebakaran hutan, perburuan satwa, perambahan kawasan, pengambilan HHBK yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi dan lainnya.
2. Sebagian besar masyarakat penyangga TN Baluran masih menggantungkan kehidupan mereka terhadap potensi alam di dalam kawasan TN Baluran (kayu bakar dan HHBK lainnya).
3. Permasalahan tata batas kawasan dan penandaan kawasan yang masih belum optimal (belum temu gelang).
4. Belum adanya SK Penetapan kawasan TN Baluran dan ditindak lanjuti dengan sosialisasi multi *stakeholder*.

5. Permasalahan pendudukan kawasan atau tumpang tindih kawasan oleh masyarakat khususnya Eks-HGU dan kawasan Translok AD yang hingga saat ini masih menjadi isu strategis TN Baluran.
6. Permasalahan pendudukan kawasan Eks-HGU Labuhan Merak seluas kurang lebih 363 hektar masih belum tuntas dan jelas arah kebijakan pengelolaannya.
7. Permasalahan pendudukan kawasan areal Translok AD pun masih belum optimal arah kebijakannya.
8. Potensi terjadinya konflik satwa (Kerbau dan Banteng) dengan manusia yaitu masyarakat yang masih tinggal di dalam (Eks-HGU dan Translok) dan atau berbatasan langsung dengan kawasan TN Baluran.
9. Terdapat beberapa aktifitas di dalam kawasan TN Baluran yang masih tidak sesuai dengan kriteria zona pengelolaan taman nasional.
10. Penetapan zonasi taman nasional yang masih belum mampu mengakomodir secara optimal berbagai macam kepentingan baik ekologis maupun sosial masyarakat penyangga, menyebabkan sering terjadinya berbagai macam tindak pelanggaran kehutanan oleh masyarakat.
11. Permasalahan *Invasive Alien Species* (IAS) berupa *Acacia nilotica* menjadi ancaman alami terhadap keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem alam TN Baluran, salah satunya memunculkan adanya fragmentasi habitat alam dari hidupan satwa liar.
12. Arah kebijakan pemulihan ekosistem TN Baluran dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan harus menjadi perhatian pengelolaan untuk menjamin efektifitas keberhasilannya.
13. Pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan masih belum optimal, seperti pemanfaatan HHBK dan jasa lainnya.
14. Pengelolaan sampah di dalam kawasan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh oleh TN Baluran.
15. Kegiatan pemberdayaan masyarakat penyangga harus lebih optimal khususnya masyarakat yang masih mempunyai ketergantungan hidup terhadap kawasan TN Baluran.

16. Kegiatan pemanfaatan HHBK yang ada di TN Baluran oleh masyarakat harus menjadi perhatian khusus, sering kalinya adanya indikasi beberapa pelanggaran kehutanan dari aktifitas pemanfaatan HHBK tersebut.
17. Kegiatan penggembalaan liar ternak oleh masyarakat penyangga masih belum mendapatkan penanganan yang optimal.
18. Dukungan kebijakan dari multipihak (*stakeholder*) terhadap pengelolaan kawasan TN Baluran masih belum optimal.

Berdasarkan beberapa hal penting terkait potensi dan permasalahan yang ada di TN Baluran diatas akan menjadi parameter dalam pengambilan suatu rumusan strategi pengelolaan kedepan. Penentuan rumusan strategi tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity dan Threat*). Analisis SWOT merupakan suatu analisa yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam merumuskan suatu strategi, yang didasarkan pada logika dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada dan secara bersamaan meminimalkan kelemahan dan ancaman (Rangkuti 1997).

Metode analisis SWOT menggunakan pembobotan yaitu pemberian nilai terhadap parameter yang telah diambil dan ditentukan berdasarkan tingkat kesesuaian dengan membandingkan persyaratan yang ditentukan. Pemberian nilai atau skor berdasarkan atas hasil pertemuan beberapa pihak yang terkait dengan subyek kajian atau penilaian terhadap kepentingan tertentu (Rangkuti, 1997). Melalui analisis SWOT, dapat teridentifikasi faktor-faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) atau dikenal dengan istilah *Internal Strategic Factor Analisis Summary* (IFAS) dan faktor-faktor eksternal (Peluang dan Ancaman) atau dikenal dengan istilah *External Strategic Factor Analisis Summary* (EFAS).

Musyawarah bersama para pihak terkait pengelolaan kawasan TN Baluran dan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk mendiskusikan tentang faktor dan parameter SWOT. Diskusi yang menghadirkan para pelaksana di lapangan dan penentu kebijakan dalam pengelolaan kawasan TN Baluran beserta beberapa pihak lain yang terkait. Hasil dari diskusi tersebut telah mampu mengidentifikasi IFAS dan EFAS dalam pengelolaan kawasan TN Baluran. Adapun hasil identifikasi seperti tersaji pada **Tabel 1**.

Tabel Faktor Internal dan Faktor Eksternal Pengelolaan Kawasan TN Baluran

Faktor Internal Pengelolaan (IFAS)	
KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
1. Kepastian hukum pengelolaan kawasan yang dilindungi oleh Undang-Undang, PP dan PermenLHK. 2. Mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang tinggi (flora dan fauna). 3. Mempunyai tipe ekosistem yang sangat kompleks. 4. Keindahan alam (<i>landscape</i>) dan kehidupan liar menjadi daya tarik wisata alam kelas dunia. 5. Jumlah SDM (ASN dan Non-ASN) yang cukup memadai untuk mendukung pengelolaan kawasan. 6. Lokasi kawasan TNB yang sangat strategis dan mudah dijangkau (aksesibilitas kawasan cukup mudah). 7. Dukungan anggaran untuk pengelolaan kawasan yang sangat mencukupi (APBN).	1. <i>Database</i> potensi kawasan belum optimal. 2. Tingkat kemampuan dari SDM (<i>Soft Skill</i>) untuk mendukung pengelolaan kawasan belum optimal. 3. Sarana prasarana pendukung pengelolaan kawasan belum memadai . 4. Dukungan modernisasi teknologi masih belum optimal. 5. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan yang masih belum optimal. 6. Mekanisme <i>rewards</i> dan <i>punishment</i> dalam pengelolaan kawasan belum berjalan optimal. 7. <i>Access</i> masuk ke dalam kawasan yang mudah dari berbagai arah.
Faktor Eksternal Pengelolaan (EFAS)	
PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Situbondo (Bupati ; DPRD ; SKPD / Dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, dan lainnya ; MUSPIDA Situbondo ; MUSPIKA Banyuputih) untuk kegiatan pengelolaan kawasan TN Baluran 2. Adanya dukungan dari 5 (lima) Desa Penyangga TN Baluran terhadap upaya pelestarian alam TN Baluran 3. Adanya dukungan para Tokoh Masyarakat sekitar kawasan hutan TN Baluran (Tokoh agama, Kyai dan Pondok Pesantren, dll). 4. Adanya dukungan yang kuat dibidang penegakan hukum kehutanan (GAKKUM, Kejaksaan Negeri Situbondo, Pengadilan Negeri Situbondo dan POLRES Situbondo) 5. Kerjasama dengan LSM Internasional – Copenhagen Zoo (CZ) yang berjalan dengan baik hingga sekarang 6. Kerjasama dengan PLN Unit Jawa Timur (SUTET) dan Telkomsel Jawa Timur 7. Pengakuan internasional kepada TN Baluran sebagai bagian zona inti Cagar Biosfer Blambangan. 8. Adanya Puslatpur Marinir yang dapat mendukung aspek pengamanan kawasan TN Baluran 9. Aksesibilitas dan sarana transportasi yang sangat lengkap untuk menuju lokasi TN Baluran (Bandara, Pelabuhan, Stasiun dan Terminal) sangat mudah 10. Hubungan dengan media masa baik cetak maupun elektronik yang sangat baik dan siap mendukung pengelolaan kawasan TN Baluran	1. Tingkat pendidikan masyarakat sekitar kawasan TN Baluran masih rendah 2. Tingkat perekonomian masyarakat / taraf hidup sekitar kawasan hutan dominan masih rendah 3. Permasalahan tenurial yang masih belum terselesaikan berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru (penampungan migran ilegal, dll) 4. Pertumbuhan penduduk di dalam kawasan (Eks HGU dan Translok AD) dan penambahan permukiman 5. Kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan terhadap hutan konservasi (TN Baluran) masih rendah 6. Terdapat sekitar 800-an masyarakat sekitar kawasan hutan TN Baluran yang masih menggantungkan hidup ke pada sumber daya alam TN Baluran 7. Politisasi kawasan TN khususnya eks HGU dan Translok AD secara negatif untuk kepentingan pribadi (elektabilitas politik, dll) 8. Tindak pelanggaran perburuan satwa liar oleh oknum aparat dan/atau oknum militer masih terjadi 9. Kurangnya dukungan secara total dari pemerintah desa (Perdes) dalam hal penegakan hukum 10. Penggembalaan ternak secara liar oleh masyarakat sekitar hutan TN Baluran 11. Penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran informasi di Era Revolusi Industri 4.0 12. Kelembagaan sebagian kelompok yang ada di masyarakat desa penyangga TN Baluran masih lemah

11. Adanya hubungan dengan beberapa universitas / PT negeri maupun swasta yang baik (UNEJ, UNTAG, UNIBA, UNARS)	13. Rendah nya mental masyarakat untuk berjuang dan bersama-sama membangun kelompok
12. Adanya rencana pembangunan akses jalan tol nasional (Tol Probawangi) yang akan melintas di sebagian kawasan TN Baluran	
13. Adanya event, festival dan pameran pariwisata dan budaya	
14. Perkembangan pemanfaatan jejaring media sosial yang sangat cepat dan signifikan	

Menurut Rangkuti (2001), langkah selanjutnya setelah diidentifikasi 4 (empat) factor SWOT adalah dilakukan pembobotan dan rating serta skor terhadap factor-faktor tersebut. Berdasarkan hasil dari identifikasi masing-masing factor tersebut di atas, kemudian dilakukan pembobotan dan peratingan. Adapun tujuan hal tersebut adalah untuk mengetahui nilai skor pengelolaan TN Baluran pada kondisi seperti apa, dan masuk ke dalam Kuadran 1, Kuadran 2, Kuadran 3 atau Kuadran 4. Hasil penilaian tersebut telah disajikan dalam bentuk matrik faktor strategis internal dan matrik faktor strategis eksternal seperti yang telah disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel Matrik Faktor Strategi Internal Pengelolaan (IFAS) TN Baluran

Faktor Strategis		Bobot	Rating	Skor
STRENGTH	Kepastian hukum pengelolaan kawasan yang dilindungi oleh Undang-Undang, PP dan PermenLHK.	0.09	4.50	0.40
	Mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang tinggi (flora dan fauna)	0.06	3.00	0.18
	Mempunyai tipe ekosistem yang sangat kompleks	0.09	4.50	0.40
	Keindahan alam (<i>landscape</i>) dan kehidupan liar menjadi daya tarik wisata alam kelas dunia	0.09	5.00	0.44
	Jumlah SDM (ASN dan Non-ASN) yang cukup memadai untuk mendukung pengelolaan kawasan	0.06	4.00	0.24
	Lokasi kawasan TNB yang sangat strategis dan mudah dijangkau (aksesibilitas kawasan cukup mudah)	0.09	4.50	0.40
	Dukungan anggaran untuk pengelolaan kawasan yang sangat mencukupi (APBN)	0.09	3.50	0.31
WEAK	Database potensi kawasan belum optimal	0.07	2.50	0.18

Tingkat kemampuan dari SDM (<i>Soft Skill</i>) untuk mendukung pengelolaan kawasan belum optimal	0.06	2.00	0.12
Sarana prasarana pendukung pengelolaan kawasan belum memadai	0.03	2.50	0.07
Dukungan modernisasi teknologi masih belum optimal	0.06	2.00	0.12
Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan yang masih belum optimal	0.04	2.50	0.11
Mekanisme <i>rewards</i> dan <i>punishment</i> dalam pengelolaan kawasan belum berjalan optimal	0.09	2.00	0.18
Access masuk ke dalam kawasan yang mudah dari berbagai arah	0.09	1.50	0.13
TOTAL	1.00		3.26

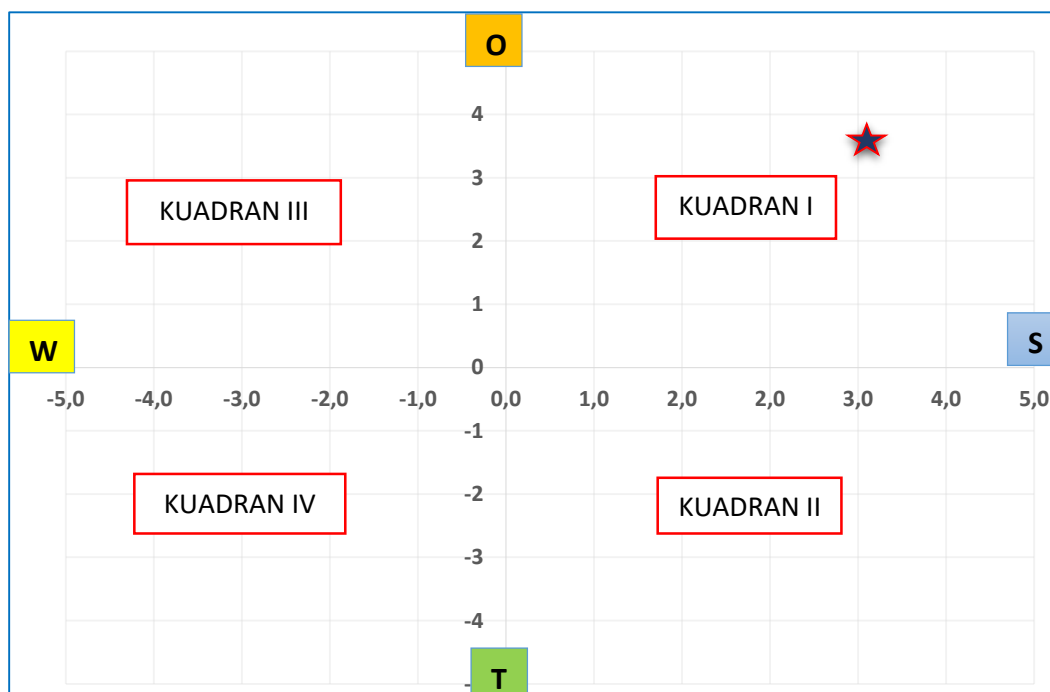
Tabel Matrik Faktor Strategi Eksternal Pengelolaan (EFAS) TN Baluran

Faktor Strategis		Bobot	Rating	Skor
OPPORTUNITIES	Adanya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Situbondo (Bupati ; DPRD ; SKPD / Dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, dan lainnya ; MUSPIDA Situbondo ; MUSPIKA Banyuputih) untuk kegiatan pengelolaan kawasan TN Baluran	0.05	4	0.18
	Adanya dukungan dari 5 (lima) Desa Penyangga TN Baluran terhadap upaya pelestarian alam TN Baluran	0.04	4.5	0.17
	Adanya dukungan para Tokoh Masyarakat sekitar kawasan hutan TN Baluran (Tokoh agama, Kyai dan Pondok Pesantren, dll)	0.04	4	0.15
	Adanya dukungan yang kuat dibidang penegakan hukum kehutanan (GAKKUM, Kejaksaan Negeri Situbondo, Pengadilan Negeri Situbondo dan POLRES Situbondo)	0.05	4	0.18
	Kerjasama dengan LSM Internasional – Copenhagen Zoo (CZ) yang berjalan dengan baik hingga sekarang	0.05	5	0.23
	Kerjasama dengan PLN Unit Jawa Timur (SUTET) dan Telkomsel Jawa Timur	0.03	4.5	0.14

Faktor Strategis		Bobot	Rating	Skor
	Pengakuan internasional kepada TN Baluran sebagai bagian zona inti Cagar Biosfer Blambangan	0.05	5	0.23
	Adanya Puslatpur Marinir yang dapat mendukung aspek pengamanan kawasan TN Baluran	0.02	4	0.06
	Aksesibilitas dan sarana transportasi yang sangat lengkap untuk menuju lokasi TN Baluran (Bandara, Pelabuhan, Stasiun dan Terminal) sangat mudah	0.03	4.5	0.14
	Hubungan dengan media masa baik cetak maupun elektronik yang sangat baik dan siap mendukung pengelolaan kawasan TN Baluran	0.05	5	0.23
	Adanya hubungan dengan beberapa universitas / PT negeri maupun swasta yang baik (UNEJ, UNTAG, UNIBA, UNARS)	0.04	3.5	0.13
	Adanya rencana pembangunan akses jalan tol nasional (Tol Probowangi) yang akan melintas di sebagian kawasan TN Baluran	0.02	3	0.05
	Adanya event, festival dan pameran pariwisata dan budaya	0.05	4.5	0.21
	Perkembangan pemanfaatan jejaring media sosial yang sangat cepat dan signifikan	0.05	5	0.23
THREATS	Tingkat pendidikan masyarakat sekitar kawasan TN Baluran masih rendah	0.05	1.5	0.07
	Tingkat perekonomian masyarakat / taraf hidup sekitar kawasan hutan dominan masih rendah	0.05	2	0.09
	Permasalahan tenurial yang masih belum terselesaikan berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru (penampungan migran ilegal, dll)	0.03	2	0.06
	Pertumbuhan penduduk di dalam kawasan (Eks HGU dan Translok AD) dan penambahan permukiman	0.05	1	0.05
	Kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan terhadap hutan konservasi (TN Baluran) masih rendah	0.05	2.5	0.12
	Terdapat sekitar 800-an masyarakat sekitar kawasan hutan TN Baluran yang masih menggantungkan hidup ke pada sumber daya alam TN Baluran	0.05	1	0.05
	Politisasi kawasan TN khususnya eks HGU dan Translok AD secara negatif untuk kepentingan pribadi (elektabilitas politik, dll)	0.02	1.5	0.03
	Tindak pelanggaran perburuan satwa liar oleh oknum aparat dan/atau oknum militer masih terjadi	0.02	1	0.02
	Kurangnya dukungan secara total dari pemerintah desa (Perdes) dalam hal penegakan hukum	0.03	2.5	0.08

Faktor Strategis		Bobot	Rating	Skor
	Pengembalaan ternak secara liar oleh masyarakat sekitar hutan TN Baluran	0.05	1.5	0.07
	Penyalahgunaan media sosial untuk penyebarluasan informasi di Era Revolusi Industri 4.0	0.02	2	0.05
	Kelembagaan sebagian kelompok yang ada di masyarakat desa penyangga TN Baluran masih lemah	0.03	2	0.06
	Rendahnya mental masyarakat untuk berjuang dan bersama-sama membangun kelompok	0.04	2	0.08
		1.00		3.16

Hasil penilaian faktor internal dan eksternal dari pengelolaan kawasan TN Baluran pada table diatas, kemudian dipetakan menggunakan diagram Cartesius seperti pada Gambar 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa posisi pengelolaan kawasan TN Baluran berada di Kuadran I yang artinya bahwa Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **progresif**, artinya organisasi Balai TN Baluran masih berada pada kondisi yang prima dan mantab untuk terus bergerak dan berkembang lebih optimal.



Gambar Diagram Cartesius Matrik SWOT Pengelolaan TN Baluran

Setelah diketahui bahwa posisi hasil analisa faktor internal dan eksternal pengelolaan TN Baluran adalah berada di Kuadran I, maka strategi utama dan prioritas yang harus dilakukan oleh TN Baluran adalah fokus pada mempertahankan dan meningkatkan semua aspek kekuatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala bentuk peluang yang ada. Sedangkan dalam proses penyusunan perencanaan program / kegiatan strategis TN Baluran dapat dilakukan kombinasi diantara 2 (dua) faktor agar menghasilkan beberapa alternatif pilihan strategi. Terdapat 4 kombinasi alternatif strategi, yaitu :

1. Strategi *Strength Opportunity* (SO) adalah strategi memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk dapat merebut dan memanfaatkan segala peluang secara optimal.
2. Strategi *Strength Threats* (ST) adalah strategi menggunakan / memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi dan menekan segala ancaman yang akan terjadi.
3. Strategi *Weakness Opportunity* (WO) adalah strategi meminimalkan adanya kelemahan untuk meraih segala bentuk peluang dan kesempatan, atau strategi dalam memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan yang ada dengan meminimalkan segala kelemahan yang dimiliki.
4. Strategi *Weakness Threat* (WT) adalah strategi dengan berusaha meminimalkan segala kelemahan yang dimiliki serta berusaha untuk menghindari berbagai ancaman atau lebih dikenal dengan strategi bertahan (defensif).

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut di atas, kemudian digunakan untuk menentukan strategi pengelolaan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. masing-masing strategi hasil kombinasi 4 (empat) unsur SWOT telah disajikan seperti pada Tabel.

Tabel 4. Matriks Strategi Pengelolaan Kawasan TN Baluran

INTERNAL	STRENGHTS	WEAKNESS
	1. Kepastian hukum pengelolaan kawasan yang dilindungi oleh Undang-Undang, PP dan PermenLHK. 2. Mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang tinggi (flora dan fauna) 3. Mempunyai tipe ekosistem yang sangat kompleks 4. Keindahan alam (<i>landscape</i>) dan kehidupan liar menjadi daya tarik wisata alam kelas dunia 5. Jumlah SDM (ASN dan Non-ASN) yang cukup memadai untuk mendukung pengelolaan kawasan 6. Lokasi kawasan TNB yang sangat strategis dan mudah dijangkau (aksesibilitas kawasan cukup mudah) 7. Dukungan anggaran untuk pengelolaan kawasan yang sangat mencukupi (APBN) 8.	1. <i>Database</i> potensi kawasan belum optimal 2. Tingkat kemampuan dari SDM (<i>Soft Skill</i>) untuk mendukung pengelolaan kawasan belum optimal 3. Sarana prasarana pendukung pengelolaan kawasan belum memadai 4. Dukungan modernisasi teknologi masih belum optimal 5. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan yang masih belum optimal 6. Mekanisme <i>rewards</i> dan <i>punishment</i> dalam pengelolaan kawasan belum berjalan optimal 7. <i>Access</i> masuk ke dalam kawasan yang mudah dari berbagai arah
EKSTERNAL	OPPORTUNITIES	STRATEGI (WO)
	STRATEGI (SO)	
	1. Meningkatkan kualitas SDM baik ASN maupun Non-ASN melalui peningkatan jejaring kerjasama dengan para <i>stakeholder</i> baik ditingkat daerah, pusat ataupun LSM yang bekerjasama. 2. Pemanfaatan potensi SDA di TN Baluran yang ada sesuai dengan daya dukung kawasan 3. Sosialisasi kegiatan pengelolaan kawasan melalui peran aktif media masa yang ada baik cetak maupun <i>online</i> 4. Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kegiatan pengelolaan TN Baluran (LSM, Pemerintah,BUMN) khususnya dibidang <i>sharing</i> pendanaan kegiatan. 5. Optimalisasi hubungan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi sekitar TN Baluran untuk mendukung kegiatan pengelolaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan dukungan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membuat <i>database</i> potensi kawasan TN Baluran secara komprehensif dan kontinyu 2. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan stakeholder terkait untuk peningkatan kemampuan <i>soft skill</i> SDM TN Baluran (diklat diklat, kursus, dll) 3. Melibatkan berbagai pihak dalam upaya Optimalisasi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan di TN Baluran 4. Optimalisasi penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan kawasan melalui peningkatan kerjasama atau dukungan dari berbagai pihak yang mempunyai pendanaan (sponsor) 5. Menerapkan skema pemberian <i>Rewards</i> dan <i>Punishment</i> kepada

11. Adanya hubungan dengan beberapa universitas / PT negeri maupun swasta yang baik (UNEJ, UNTAG, UNIBA, UNARS) 12. Adanya rencana pembangunan akses jalan tol nasional (Tol Probowangi) yang akan melintas di sebagian kawasan TN Baluran 13. Adanya event, festival dan pameran pariwisata dan budaya 14. Perkembangan pemanfaatan jejaring media sosial yang sangat cepat dan signifikan	6. Dukungan untuk peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan event-event, cagar biosfer, festival dan pameran	seluruh SDM di TN Baluran 6. Menjalin dukungan multipihak untuk meningkatkan pengawasan dan penjagaan di seluruh Access masuk ke kawasan TN Baluran
THREATS 1. Tingkat pendidikan masyarakat sekitar kawasan TN Baluran masih rendah 2. Tingkat perekonomian masyarakat / taraf hidup sekitar kawasan hutan dominan masih rendah 3. Permasalahan tenurial yang masih belum terselesaikan berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru (penampungan migran ilegal, dll) 4. Pertumbuhan penduduk di dalam kawasan (Eks HGU dan Translok AD) dan penambahan permukiman 5. Kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan terhadap hutan konservasi (TN Baluran) masih rendah 6. Terdapat sekitar 800-an masyarakat sekitar kawasan hutan TN Baluran yang masih menggantungkan hidup ke pada sumber daya alam TN Baluran 7. Politisasi kawasan TN khususnya eks HGU dan Translok AD secara negatif untuk kepentingan pribadi (elektabilitas politik, dll) 8. Tindak pelanggaran perburuan satwa liar oleh oknum aparat dan/atau oknum militer masih terjadi 9. Kurangnya dukungan secara total dari pemerintah desa (Perdes) dalam hal penegakan hukum 10. Penggembalaan ternak secara liar oleh masyarakat sekitar hutan TN Baluran 11. Penyalahgunaan media sosial untuk penyebarluasan informasi di era Revolusi Industri 4.0 12. Kelembagaan sebagian kelompok yang ada di masyarakat desa penyangga TN Baluran masih lemah 13. Rendahnya mental masyarakat untuk berjuang dan bersama-sama membangun kelompok	STRATEGI (ST) 1. Kerjasama dengan multipihak yang terkait pengamanan /Perlindungan kawasan, Pengawetan dan Pemanfaatan secara Lestari 2. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa penyangga, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih tergantung dengan hutan (ekonomi rendah) 3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kehutanan (sosialisasi, pembinaan, pendampingan kelompok) kepada masyarakat penyangga TN Baluran 4. Penegakan hukum (<i>Law Enforcement</i>) terhadap tindak pelanggaran kehutanan dengan tetap mengedepankan kemanusiaan secara sinergi dengan pembentukan Peraturan Desa (Perdes)	STRATEGI (WT) 1. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasana pendukung pengelolaan kawasan TN Baluran 2. Menyusun pedoman, SOP atau aturan tentang monitoring dan pengamanan semua jalur / akses masuk ke dalam kawasan TN Baluran 3. Monitoring tindak pelanggaran hutan (tenurial, pencurian kayu, perburuan) yang dilakukan secara rutin dan tertib laporan.

Berdasarkan matrik pada Tabel 4 diatas, dengan memperhatikan keadaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang ada, maka beberapa opsi strategi kebijakan yang dapat diambil oleh TN Baluran kedepannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM baik ASN maupun Non-ASN melalui peningkatan jejaring kerjasama dengan para *stakeholder* baik ditingkat daerah, pusat ataupun LSM yang bekerjasama.
2. Pemanfaatan potensi SDA di TN Baluran yang ada sesuai dengan daya dukung kawasan
3. Sosialisasi kegiatan pengelolaan kawasan melalui peran aktif media masa yang ada baik cetak maupun *online*
4. Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kegiatan pengelolaan TN Baluran (LSM, Pemerintah, BUMN) khususnya dibidang *sharing* pendanaan kegiatan.
5. Optimalisasi hubungan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi sekitar TN Baluran untuk mendukung kegiatan pengelolaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat
6. Dukungan untuk peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan event-event, cagar biosfer, festival dan pameran
7. Meningkatkan dukungan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membuat *database* potensi kawasan TN Baluran secara komprehensif dan kontinyu
8. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan stakeholder terkait untuk peningkatan kemampuan *soft skill* SDM TN Baluran (diklat diklat, kursus, dll)
9. Melibatkan berbagai pihak dalam upaya Optimalisasi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan di TN Baluran
10. Optimalisasi penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan kawasan melalui peningkatan kerjasama atau dukungan dari berbagai pihak yang mempunyai pendanaan (sponsor)
11. Menerapkan skema pemberian *Rewards* dan *Punishment* kepada seluruh SDM di TN Baluran
12. Menjalin dukungan multipihak untuk meningkatkan pengawasan dan penjagaan di seluruh *Access* masuk ke kawasan TN Baluran
13. Kerjasama dengan multipihak yang terkait pengamanan /Perlindungan kawasan, Pengawetan dan Pemanfaatan secara Lestari

14. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa penyangga, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih tergantung dengan hutan (ekonomi rendah)
15. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kehutanan (sosialisasi, pembinaan, pendampingan kelompok) kepada masyarakat penyangga TN Baluran
16. Penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap tindak pelanggaran kehutanan dengan tetap mengedepankan kemanusiaan secara sinergi dengan pembentukan Peraturan Desa (Perdes)
17. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasana pendukung pengelolaan kawasan TN Baluran
18. Menyusun pedoman, SOP atau aturan tentang monitoring dan pengamanan semua jalur / akses masuk ke dalam kawasan TN Baluran
19. Monitoring tindak pelanggaran hutan (ternurial, pencurian kayu, perburuan) yang dilakukan secara rutin dan tertib laporan.

Strategi diatas, merupakan langkah-langkah pengelolaan kawasan TN Baluran kedepannya untuk mendukung keberhasilan manajemen. Tingkat keberhasilan tersebut diarahkan untuk mengawal dan mewujudkan Visi dan Misi Balai TN Baluran.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1 Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Arahan RPJP Nasional 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negaranegara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam konstitusi negara. tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan prioritas. Pentahapannya disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter sumberdaya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025. RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2019, RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka Presiden Republik Indonesia menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi Presiden Tahun 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Presiden Tahun 2020-2024:



Gambar Misi Presiden Tahun 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

5 Arahan Presiden antara lain:

- 1) **Pembangunan Sumber Daya Manusia** : Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- 2) **Pembangunan Infrastruktur** : Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3) **Penyederhanaan Regulasi** : Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- 4) **Penyederhanaan Birokrasi** : Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
- 5) **Transformasi Ekonomi** : Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7 Agenda Pembangunan tahun 2020 – 2024:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Salah satu agenda pembangunan tahun 2020-2024 adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim merupakan salah satu agenda pembangunan yang harus dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020-2024.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.



Gambar agenda pembangunan tahun 2020-2024

Salah satu rumusan Misi Presiden yang terkait langsung dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Terdapat 2 (dua) pilar KLHK sebagai penopang untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden tersebut, yaitu:

- 1) Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup adalah upaya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saatnya nanti.
- 2) Kesejahteraan adalah tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan.

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
- 2) Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional;
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
- 4) Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDG's). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
- 2) Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
- 3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
- 4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Direktorat Jenderal KSDAE memiliki visi dan misi yang sama dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta KLHK, yaitu **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Begitupun dengan langkah yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan KLHK yaitu “Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional”, sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan.

Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

- 1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- 3) Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari;
- 4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi; dan
- 5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi.

Visi Taman Nasional Baluran

Visi yang ditetapkan Balai Taman Nasional Baluran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pengelolaan adalah **“Mengembalikan kondisi satwa dan habitatnya seperti pada kondisi awal tahun 1960-an, serta mampu memberikan manfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat”**.

Era tahun 1960an dipandang sebagai era dimana kondisi kawasan Baluran ideal, dimana Baluran adalah hamparan savana yang indah, yang dipenuhi oleh berbagai satwa elok dan menjadi objek wisata bagi masyarakat baik lokal maupun asing. Kondisi era tahun 1960-an dipandang ideal untuk meningkatkan peran ekosistem Baluran sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi Taman Nasional Baluran

Dalam mewujudkan Visi pengelolaan tersebut ditempuh Misi pengelolaan Taman Nasional Baluran berikut:

- 1) Melakukan pengelolaan satwa dan habitatnya secara efektif, efisien, dan lestari guna mengembalikan kondisi satwa dan habitatnya seperti pada kondisi awal tahun 1960-an.
- 2) Melakukan pengelolaan wisata alam melalui pengembangan ekowisata dan wisata minat khusus untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan negara.

Sasaran strategis Taman Nasional Baluran

Misi 1 : Melakukan pengelolaan satwa dan habitat secara efektif, efisien dan lestari guna mengembalikan kondisi satwa dan habitatnya seperti pada kondisi awal tahun 1960-an

Tujuan 1 : Melakukan pengelolaan dan perlindungan habitat Banteng dan kapasitas Breeding Banteng secara efektif, efisien, dan lestari dengan sasaran:

- Meningkatkan kualitas savana dan habitat Banteng.
- Memperkuat kapasitas sistem *breeding* yang sedang dikembangkan untuk menghasilkan individu-individu banteng baru dengan vitalitas tinggi yang siap dilepas liarkan di TNB.
- Meningkatkan dukungan dan kepedulian masyarakat dan stakeholder dalam konservasi Banteng.
- Meningkatkan kompetensi dan kecakapan staf dalam pengelolaan, perlindungan dan manajemen *breeding site*

Misi 2 : Melakukan pengelolaan wisata alam melalui pengembangan ekowisata dan wisata minat khusus untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan negara.

Tujuan 2 : Melakukan pengelolaan wisata alam secara lestari dengan sasaran :

- Meningkatkan kontribusi dan distribusi pemanfaatan pariwisata alam bagi para pihak di Taman Nasional Baluran, peningkatan pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pengelolaan destinasi dan atraksi wisata di TNB dengan memaksimalkan peran pariwisata dalam konservasi dan meminimalkan dampak pariwisata terhadap keanekaragaman hayati.

Taman Nasional Baluran adalah unsur unit pengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Taman Nasional Baluran sebagai Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, mengamanatkan bahwa Taman Nasional Baluran mempunyai tugas penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas tersebut, Taman Nasional Baluran menyelenggarakan fungsi:

- 1) Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- 2) Perlindungan dan pengamanan kawasan;
- 3) Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- 4) Pengendalian kebakaran hutan;
- 5) Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
- 6) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
- 7) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- 8) Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- 9) Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- 10) Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- 11) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- 12) Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

BAB III

KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan

Telah ditetapkan 4 (empat) Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020-2024 yaitu: (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, (3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, (4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang adaptif. Ada 6 (enam) sasaran program Direktorat Jenderal Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yang mendukung sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem antara lain:

- 1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati.
- 2) Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL.
- 3) Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari.
- 4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- 5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi.
- 6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tersebut memiliki indikator sebagai berikut:

- 1) Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman Hayati (70 juta hektar).
- 2) Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran (10,5 Trilyun Rupiah).
- 3) Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (700 Milyar Rupiah).
- 4) Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (4.500 Desa)
- 5) Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (552 Unit KK).
- 6) Meningkatnya Efektifitas Layanan Dukungan Manajemen Lingkup Ditjen KSDAE (1 Layanan).

Dari keenam Sasaran Program (SP) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tersebut, Balai Taman Nasional Baluran (TN Baluran) akan mendukung dalam pencapaian 5 sasaran program, yaitu :

- 1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati.

- 2) Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari.
- 3) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- 4) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi.
- 5) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Untuk mendukung pencapaian target dari Indikator Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem selama tahun 2020-2024, Balai Taman Nasional Baluran akan turut berperan dengan melaksanakan 5 (lima) kegiatan. yaitu:

- 1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
 Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. kegiatan tersebut memiliki indikator (IKK) sebagai berikut:
 - a) Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar).
 - b) Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK).
 - c) Jumlah simpul data keanekaragaman hayati yang dikembangkan (1 Simpul Data)

Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Output kegiatan berupa Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi dengan indikator kinerja output yaitu :

- a) Luas area kawasan konservasi yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif
- b) Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi (sebanyak 1 Dokumen Usulan Revisi Zona Pengelolaan).
- c) Jumlah simpul data keanekaragaman hayati yang dikembangkan.

Target capaian IKK yang menjadi bagian dari UPT Balai Taman Nasional Baluran, yaitu :

- a) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif seluas 5,422 Hektar;
- b) Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sebanyak 1 Unit KK.

- 2) Kegiatan Pengelolaan Konservasi
 Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan pengelolaan konservasi yaitu terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Kegiatan tersebut memiliki indikator (IKK) sebagai berikut :
 - a) Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (4.500 Desa).
 - b) Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (1,8 Juta Hektar).

- c) Jumlah luas area kawasan konservasi yang ditangani melalui kemitraan dan Pemulihan Ekosistem (340 Ribu Hektar).
- d) Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (552 Unit KK).

Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Kegiatan pengelolaan konservasi menghasilkan indikator kinerja output berupa:

- a) Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif.
- b) Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani.
- c) Jumlah Luas area kawasan konservasi yang ditangani melalui kemitraan dan Pemulihan Ekosistem.
- d) Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya.

Target capaian IKK yang menjadi bagian dari UPT Balai Taman Nasional Baluran, yaitu :

- a. Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif sebanyak 4 Desa;
- b. Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani seluas 8.204,75 Hektar;
- c. Jumlah luas area kawasan konservasi yang ditangani melalui kemitraan dan pemulihan ekosistem seluas 330 Hektar;
- d. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya sebanyak 1 Unit KK.

3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik. Kegiatan tersebut memiliki indikator (IKK) sebagai berikut :

- a) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (65 Juta Hektar),
- b) Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.800 Entitas),
- c) Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.000 Entitas),
- d) Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (1 Sistem),
- e) dan Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (5 Unit).

Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Kegiatan konservasi spesies genetik menghasilkan indikator kinerja output berupa:

- a) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif;
- b) Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL;
- c) Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL;
- d) Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- e) dan Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (5 Unit).

Target capaian IKK yang menjadi bagian dari UPT Balai Taman Nasional Baluran, yaitu :

- a) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL 25.000 Hektar.

4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Kegiatan tersebut memiliki indikator (IKK) sebagai berikut :

- a) Jumlah destinasi wisata alam prioritas (15 Destinasi);
- b) Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (100 Ijin);
- c) Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (7 Destinasi);
- d) Jumlah destinasi wisata alam bahari (3 Destinasi).

Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Kegiatan konservasi spesies genetik menghasilkan indikator kinerja output berupa:

- a) Jumlah destinasi wisata alam prioritas;
- b) Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam;
- c) Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education;
- d) Jumlah destinasi wisata alam bahari.

Target capaian IKK yang menjadi bagian dari UPT Balai Taman Nasional Baluran, yaitu :

- a) Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education*. Sedangkan Kegiatan ini menghasilkan indikator kinerja output berupa Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan (1 Destinasi).

- 5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
- Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran tersebut memiliki indikator berupa Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin). Sedangkan output kegiatan berupa:
- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
 - Layanan Internal (Overhead)
 - Layanan Perkantoran

Rincian kegiatan, sasaran kegiatan dan output kegiatan dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Taman Nasional Baluran disajikan pada tabel berikut.

Tabel Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan pada Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2020-2024.

Kegiatan Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Output	Target		Keterangan
	Direktorat Jenderal KSDAE	Balai TN Baluran	
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam			
Sasaran Kegiatan (SK) : Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam			
IKK1-Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	27,14 Juta Hektar	5,422 Hektar	Kawasan Taman Nasional Baluran
IKK2- Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	150 Unit KK	1 Unit KK	Kawasan Taman Nasional Baluran
IKK3-Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	5 Simpul Data	-	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi			
Sasaran Kegiatan (SK) : Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru			
IKK1-Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	4.500 Desa	4 Desa	Desa Penyangga yang ada di Taman Nasional Baluran ada 4 Desa antara lain: Desa Wonorejo, Desa Bajulmati, Desa Sumberwaru dan Desa Sumberayar
IKK2-Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani seluas	1,8 Juta Hektar	8.204,75 Hektar	Dengan target capaian tiap tahunnya seluas 1.640, 95 Hektar
IKK3-Jumlah luas area kawasan konservasi yang ditangani melalui kemitraan dan pemulihan ekosistem	340 Ribu Hektar	330 Hektar	Dengan detail target capaian yaitu: - Tahun 2020 dengan target 250 Hektar - Tahun 2021 s.d 2024 dengan target masing-masing 20 Hektar tiap tahunnya

Kegiatan Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Output	Target		Keterangan
	Direktorat Jenderal KSDAE	Balai TN Baluran	
IKK4-Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	552 Unit KK	1 Unit KK	Kawasan Taman Nasional Baluran
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik			
Sasaran Kegiatan (SK) : Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik			
IKK1-Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	65 Juta Hektar	25.000 Hektar	25.000 Hektar merupakan kawasan Taman Nasional Baluran yang merupakan area site monitoring Macan Tutul dan Banteng
IKK2-Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	1.800 Entitas	-	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
IKK3-Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	1.000 Entitas	-	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
IKK4-Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	1 Sistem	-	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
IKK5-Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun	5 Unit	-	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
Sasaran Kegiatan (SK) : Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi			
IKK1-Jumlah destinasi wisata alam prioritas	15 Destinasi	-	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
IKK2-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	100 Ijin	-	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
IKK3-Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i>	7 Destinasi	1 Destinasi	Kawasan Taman Nasional Baluran merupakan salah satu dari 7 Destinasi yang masuk kedalam IKK3
IKK4-Jumlah destinasi wisata alam bahari	3 Destinasi	-	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			
Sasaran Kegiatan (SK) : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE			
IKK1-Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00	80,00 Poin	80,00 Poin	-
IKK2-Terselenggaranya layanan perkantoran yang optimal dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	1 Layanan	1 Layanan	-

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing *Output* Kegiatan

Rumusan Komponen Kegiatan disusun dengan cara menurunkan apa yang terkandung dan terkait dengan rumusan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari Renstra Direktorat Jenderal KSDAE yang relevan. Sedangkan komponen kegiatan tersebut disusun untuk menjelaskan tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian keluaran (*Output*) kegiatan. Untuk mendukung pencapaian output kegiatan tersebut, Balai Taman Nasional Baluran akan melakukan komponen-komponen kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel IKK, keluaran (*output*) dan komponen/sub komponen kegiatan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Komponen Kegiatan
1	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi	Luas Kawasan sebagai penyedia Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi	a) Inventarisasi, verifikasi Potensi dan Permasalahan KK b) Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan c) Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi
2	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	a) Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi b) Penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi c) Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi
3	Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	a) Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat di sekitar KK b) Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa
4	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	a) Penyelesaian konflik Tenurial di Kawasan Konservasi
5	Jumlah Luas area KK yang ditangani melalui kemitraan dan Pemulihan Ekosistem	Jumlah Luas area KK yang ditangani melalui kemitraan dan Pemulihan Ekosistem	b) Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa
6	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	a) Perencanaan kelola Kawasan Konservasi b) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi c) Pengendalian Kebakaran Hutan
7	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan	a) Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Keluaran (Output)	Komponen Kegiatan
	dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	
8	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (7 Destinasi)	Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjunga	a) Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi b) Peningkatan Pengelolaan Jasa Wisata Alam berbasis masyarakat c) Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam d) Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam

1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam.

IKK1- Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif.

Untuk menunjang pencapaian IKK ini, komponen kegiatan yang telah ditetapkan meliputi : 1) Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK; 2) Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan; 3) Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi.

IKK2- Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi.

Untuk menunjang pencapaian IKK ini, komponen kegiatan yang telah ditetapkan meliputi : 1) Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi; 2) Penyelesaian Permasalahan Pemolaan Kawasan Konservasi, dan; 3) Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi.

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.

IKK1- Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif.

Untuk menunjang pencapaian IKK ini, komponen kegiatan yang telah ditetapkan meliputi : 1) Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat di sekitar KK, dan; 2) Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa.

IKK2- Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani.

Untuk menunjang pencapaian IKK ini, komponen kegiatan yang telah ditetapkan yaitu Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi.

IKK3- Jumlah Luas area KK yang ditangani melalui kemitraan dan Pemulihan Ekosistem.

Untuk menunjang pencapaian IKK ini, komponen kegiatan yang telah ditetapkan yaitu Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa.

IKK4- Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya.

Untuk menunjang pencapaian IKK ini, komponen kegiatan yang telah ditetapkan meliputi : 1) Perencanaan Kelola Kawasan Konservasi; 2) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi, dan; 3) Pengendalian Kebakaran Hutan.

3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik.

IKK1- Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif.

Untuk menunjang pencapaian IKK ini, komponen kegiatan yang telah ditetapkan meliputi : 1) Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi;

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

IKK1- Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education*

Untuk menunjang pencapaian IKK ini, komponen kegiatan yang telah ditetapkan meliputi : 1) Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; 2) Peningkatan Pengelolaan Jasa Wisata Alam Berbasis Masyarakat; 3) Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam, dan; 4) Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam.

5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

IKK1- Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE

Untuk menunjang pencapaian IKK ini, komponen kegiatan yang telah ditetapkan meliputi : 1) Penyusunan Program dan Anggaran (Dokumen); 2) Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen); 3) Data, Sistem Informasi dan Kehumasan (Dokumen); 4) Hukum dan Kerjasama Teknik (Dokumen); 5) Kepegawaian dan Ortala (Dokumen); 6) Pengelolaan Jabatan Fungsional (Dokumen); 7) Keuangan dan Perlangkapan; 8) Tata Usaha Pimpinan.

IKK2- Terselenggaranya layanan perkantoran yang optimal dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menunjang pencapaian IKK ini, komponen kegiatan yang telah ditetapkan meliputi : 1) Gaji dan tunjangan, serta; 2) Operasional pemeliharaan kantor.

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan disusun dengan menjelaskan 6 (enam) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam Pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Keenam Pengarusutamaan ini diantaranya adalah Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, dan Transformasi Digital.

Pengarusutamaan Gender pada Program KSDAE

- Analisis Situasi :
- Petugas masih kurang memahami tentang gender/ARG.
 - Pemahaman petugas pembina kelompok tani (penyuluh) yang masih memprioritaskan laki-laki sebagai anggota kelompok karena perempuan dianggap kurang mampu.
 - Pemahaman masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam berperan aktif pengelolaan daerah penyangga khususnya perempuan masih kurang.
 - Terbatasnya waktu yang tersedia bagi kaum perempuan untuk beraktivitas diluar rumah dikarenakan banyaknya tanggungjawab dalam mengurus rumah tangga Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar kepada perempuan untuk berperan aktif dalam kelompok tani masih kurang.
 - Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar kepada perempuan untuk berperan aktif dalam kelompok tani masih kurang.
 - Adanya budaya di masyarakat yang masih menganggap perempuan lebih baik di rumah.
 - Faktor keamanan bepergian ke luar rumah.

Rencana Aksi	Komponen 1	Melakukan sosialisasi mengenai peran yang dapat dilakukan bagi laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan daerah penyangga kawasan konservasi
	Komponen 2	Melakukan pembinaan pada kelompok tani melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perempuan
	Komponen 3	Memberikan pendampingan kepada Kelompok tani perempuan (terutama dalam mengakses sumberdaya)

Dampak/ hasil output kegiatan : 1) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelompok tani desa penyangga kawasan konservasi

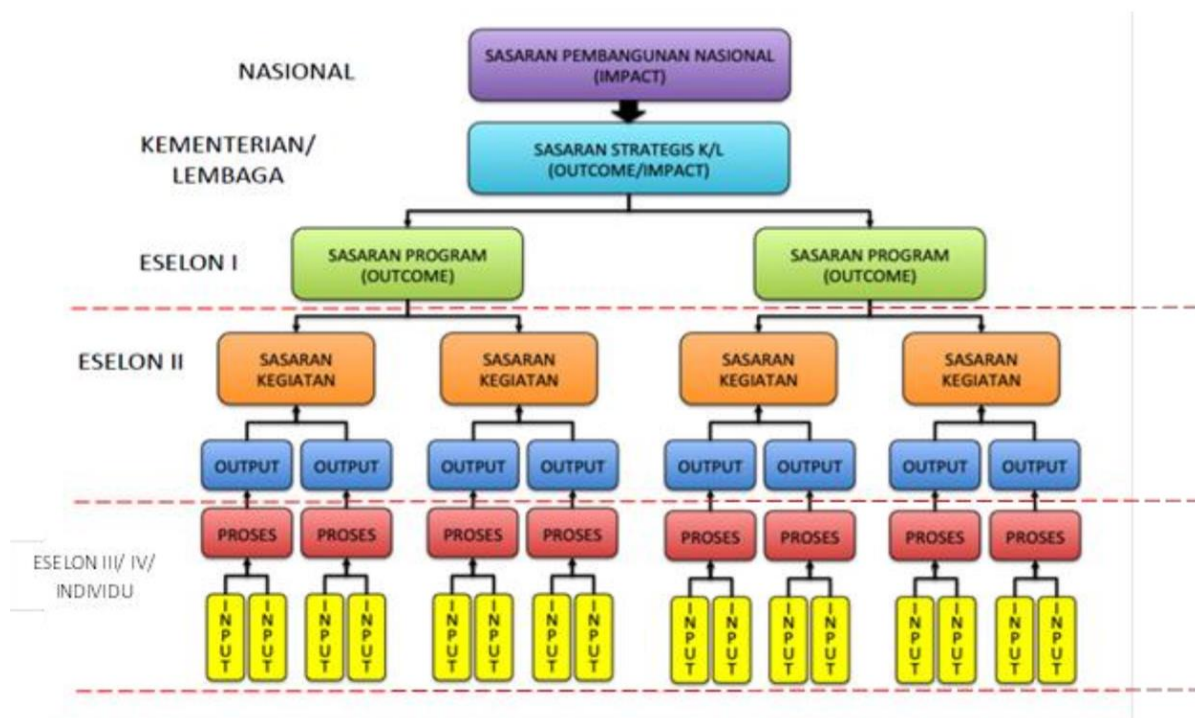
- 2) Adanya panduan pembinaan/ pelatihan yang mengakomodasikan masalah gender
- 3) Meningkatkan partisipasi kelompok tani desa penyangga kawasan konservasi

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan (Cascading)

Sasaran Strategis Kementerian LHK diturunkan menjadi Sasaran Program Ditjen KSDAE yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan, dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Kementerian LHK (IKU), Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan (IKK). Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada Balai TN MeBeti diadopsi langsung dari Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (cascading) Ditjen KSDAE. Dari peta tersebut, kemudian dijabarkan lagi ke dalam Komponen Kegiatan untuk mendukung pencapaian output.



Gambar Peta Sasaran Strategi, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

4.2. Target Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan bahwa 4 (empat) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh 6 (enam) sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Taman Nasional Baluran pada Renstra 2020-2024 akan mendukung dalam pencapaian 5 sasaran program Ditjen KSDAE, yaitu :

- 1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati,
- 2) Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari.
- 3) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- 4) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi
- 5) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Untuk mendukung pencapaian target dari Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem selama tahun 2020-2024, Balai Taman Nasional Baluran akan turut berperan dengan melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE yaitu:

- 1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
- 2) Kegiatan Pengelolaan Konservasi
- 3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik
- 4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
- 5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Indikator Kinerja Program (IKP) dari Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tersebut diuraikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman Hayati (juta hektar)	70	70	70	70	70
3	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (Milyar Rupiah)	120	250	390	540	700
4	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Desa)	500	1.500	2.500	3.500	4.500

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (Unit KK)	552	552	552	552	552
6	Meningkatnya Efektifitas Layanan Dukungan Manajemen Lingkup Ditjen KSDAE (Layanan)	1	1	1	1	1

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Program tersebut oleh didukung 6 (enam) kegiatan di tingkat eselon II dan dilaksanakan oleh 74 satker daerah dan 1 satker pusat. Masing-masing kegiatan mempunyai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, yang dijabarkan melalui Output (keluaran) pada rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya.

Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2020-2024 yang direncanakan dilaksanakan di Balai Taman Nasional Baluran diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif					Komponen	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	5.422 Ha	-	-	-	-	Desain Inventarisasi Kehati Nasional (Dokumen)	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK (Unit)	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan (Hektar)	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Balai Kliring Kehati (Dokumen)	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif					Komponen	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
							Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi (Hektar)	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
2	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)	1 Unit KK	-	-	-	-	Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Penyelesaian Permasalahan Pemolaan Kawasan Konservasi	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
3	Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan (Simpul Data)	-	-	-	-	-	Operasional sistem clearing house kehati	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Koordinasi dan konsultasi	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE

2. Kegiatan Pengelolaan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif					Komponen	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Desa)	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat di sekitar KK	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif					Komponen	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
2	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (Juta Hektar)	1.640,95 Ha	1.640,95 Ha	1.640,95 Ha	1.640,95 Ha	1.640,95 Ha	Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
3	Jumlah Luas area KK yang ditangani melalui kemitraan dan Pemulihan Ekosistem (Ribu Hektar)	250 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
4	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (Unit KK)	1 Unit KK	1 Unit KK	1 Unit KK	1 Unit KK	1 Unit KK	Perencanaan kelola Kawasan Konservasi	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Pengendalian Kebakaran Hutan	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE

3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif					Komponen	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	25.000 Ha	25.000 Ha	25.000 Ha	25.000 Ha	25.000 Ha	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Intervensi Manajemen TSL di luar Kawasan Konservasi	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Penanganan Satwa Transit dan Konflik	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif					Komponen	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
								Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Pengelolaan Zoonosis dan IA	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
2	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	-	-	-	-	-	Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Pengembangan jenis bioprospecting	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
3	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	-	-	-	-	-	Monitoring Lembaga Konservasi	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
4	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (Sistem)	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Konsultasi	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							NSPK sistem pendanaan	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
5	Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (Unit)	-	-	-	-	-	FS dan DED PPS	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Pembangunan PPS	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif					Komponen	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	-	-	-	-	-	Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Peningkatan Pengelolaan Jasa Wisata Alam berbasis masyarakat	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
2	Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (Izin)	-	-	-	-	-	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif					Komponen	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
								Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
3	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (Destinasi)	1 Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Peningkatan Pengelolaan Jasa Wisata Alam berbasis masyarakat	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
4	Jumlah destinasi wisata alam bahari (Destinasi)	-	-	-	-	-	Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Peningkatan Pengelolaan Jasa Wisata Alam berbasis masyarakat	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam	Tidak termasuk target Balai Taman Nasional

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif					Komponen	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
								Baluran dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE

5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif					Komponen	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin)	78	78,5	79	79,5	80	Penyusunan Program dan Anggaran (Dokumen)	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Data, Sistem Informasi dan Kehumasan (Dokumen)	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Hukum dan Kerjasama Teknik (Dokumen)	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Kepegawaian dan Ortala (Dokumen)	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Pengelolaan Jabatan Fungsional (Dokumen)	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Keuangan dan Perlengkapan	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE
							Tata Usaha Pimpinan	Mendukung Target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE

4.3. Kerangka Pendanaan

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan 5 kegiatan dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar **Rp. 66.865.663.000,-**. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan IKP. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar **Rp.58.402.053.000,-** sudah termasuk dengan memperhitungkan kenaikan tunjangan kinerja. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar **Rp. 125.267.716.000,-**.

Pendanaan tersebut bisa didapatkan dari sumber APBN, Mitra dan Hibah langsung lainnya yang tidak tercatat di APBN dan dapat dihitung. Kami mencoba untuk menghitung besaran kontribusi pendanaan yang dihasilkan dari seluruh kerja sama di bidang KSDAE.

Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya. Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020-2024

TAHUN	BELANJA PEGAWAI DAN OPERASIONAL	BELANJA KEGIATAN	TOTAL
2020	12.101.000.000	10.569.300.000	22.670.300.000
2021	12.706.050.000	11.097.765.000	23.803.815.000
2022	13.341.352.000	11.652.653.000	24.994.005.000
2023	14.008.420.000	12.235.285.000	26.243.705.000
2024	14.708.841.000	12.847.050.000	27.555.891.000
TOTAL	66.865.663.000	58.402.053.000	125.267.716.000

BAB V

PENUTUP

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah melindungi potensi sumber daya alam pada tingkat ekosistem, spesies dan genetik, dan meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya alam dan ekosistem, khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai oleh Ditjen KSDAE adalah menjadikan potensi sumber daya alam dan ekosistem sebagai modal pembangunan dalam mendukung program pemerintah Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang KSDAE di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE ini diharapkan dapat menuntun seluruh aparat di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE untuk berupaya mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati.

Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran merupakan sarana acuan dalam memandu pelaksanaan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Baluran selama kurun waktu 5 Tahun ke depan (2020 – 2024). Pembuatan Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran ini dilaksanakan dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020 – 2024 dan RPTN Balai Taman Nasional Baluran 2014- 2023.

Balai Taman Nasional Baluran merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE yang memiliki luas 25.000 Hektar yang terletak di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Balai Taman Nasional Baluran termasuk Taman Nasional tipe B yang terdiri atas 2 Seksi Pengelolaan Taman Nasional dan 6 Resort Pengelolaan Taman Nasional. Penyusunan Renstra ini juga melibatkan dan memperhatikan usulan dan kepentingan seluruh pihak-pihak yang tersebut di atas.

Pelaksanaan Renstra ini akan berhasil apabila seluruh pihak yang berkepentingan mampu melaksanakan dan menerapkannya di lapangan, serta tergantung kepada potensi yang ada, kendala hambatan yang terjadi, dan kesesuaian dengan asumsi yang digunakan. Komunikasi, Koordinasi serta

sikronisasi dengan seluruh instansi dan pihak terkait sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaannya.